



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH

**RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI DENGAN DIRJEN
ILMATE DAN DIRJEN KPAAI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI DAN
PERUSAHAAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : V
Rapat ke- :
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023
Waktu : Pukul 13.50 WIB s.d.16.50 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara
1, Jakarta
Ketua Rapat : Sugeng Suparwoto (F-Nasdem/Ketua Komisi VII
DPR RI)
Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPR RI
Acara : 1. Progress Pembangunan Kawasan Industri
2. lain-lain.
Hadir : 19 orang anggota hadir dari 51 orang Anggota
Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

A. ANGGOTA DPR RI:

PIMPINAN:

1. Sugeng Prawoto/F-Nasdem/ Ketua Komisi VII
DPR RI
2. H. Dony Maryadi Oekon, S.T./F-PDIP/Wakil
Ketua Komisi VII DPR RI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

5 orang anggota dari 10 anggota:

1. H. Yulian Gunhar, S.H., M.H.
2. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
3. Mercy Christy Barends, S.T.

4. Adian Yunus Yusak Napitupulu
5. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

4 orang anggota dari 7 anggota:

1. Drs. H. M. Gandung Pardiman, M.M.
2. Drs. Mukhtarudin
3. Bambang Hermanto, S.E.
4. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Dr. Ramson Siagian

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Rico Sia

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E., M.M.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Muhammad Nasir
2. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ir. H. Tifatul Sembiring
2. H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang anggota dari 3 anggota:

1. H. Nasril Bahar, S.E.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Lilik Widodo (Ditjen ILMATE)
2. Eko S.A. Cahyanto, S.H., LL.M. (Dirjen KPAIL)
3. Wu Huadi (Dirut IMIP)
4. Irsan Wijaya (Dir. Operasional PT. IMIP)
5. Scott (Dirut PT IWIP)
6. Yudi (GM PT IWIP)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-NASDEM/KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian.

Mari kita ikuti atau kita mulai Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen ILMATE dan Dirjen KPAlI Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dengan menghadirkan perusahaan-perusahaan pengembang kawasan industri.

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.*

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI, *insya* Allah dalam perjalanan nanti akan hadir beberapa pimpinan.
Yang kami hormati Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, yang juga akan segera merapatkan diri,
Yang kami hormati Dirjen ILMATE.

Ini kebetulan beliaunya sedang bertugas ke Jawa Timur sehingga mewakili kepada Bapak Lilik Widodo ya, betul. Ya, kami terima surat kalau memang ada alasan ada ini yang memang ini sebagai sebuah etik protokoler saya kira. Baik.

Dan juga dari yang kita hormati juga Dirjen KPAlI Kementerian Perindustrian, Yang kami hormati Direktur Utama PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), bisa bahasa Indonesia? *You can speak bahasa?*

DIR. OPERASIONAL PT IMIP (IRSAN WIJAYA):

Bahasa Indonesia agak kurang, nanti saya mewakili beliau.

KETUA RAPAT:

Oke, ya sudah pokoknya karena secara protokol memang kita harus pakai Bahasa Indonesia, nanti tolong ya.

DIR. OPERASIONAL PT IMIP (IRSAN WIJAYA):

Siap, nanti saya sampaikan.



KETUA RAPAT:

Yang kami hormati PT Indonesia Weda Bay Industrial Park, bisa Bahasa Indonesia? Ya, *oke*.

Yang kami hormati Direktur Utama PT Anugrah Tambang Industri,

Yang kami hormati Direktur Utama PT Ration Bangka Abadi untuk Kawasan Industri Sadai serta hadirin yang berbahagia.

Pertama, pasti kita semuanya bersyukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Kuasa kita dikaruniai nikmat sehat *wal'afiat*, sehingga kita semuanya dapat menyelenggarakan aktivitas salah satunya adalah rapat dengar pendapat ini dalam rangka memenuhi tugas konstitusional kita masing-masing. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap Anggota DPR RI yang terhormat Komisi VII, serta undangan hadirin sekalian bahwa hari ini kita selenggarakan rapat dengar pendapat dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023. Pada hari ini Komisi VII DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen ILMATE dan Dirjen KPAIL Kementerian Perindustrian dengan menghadirkan perusahaan-pesannya pengembangan kawasan industri dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan.

Bapak-Ibu pasti tahu legislatif dalam hal ini DPR secara normatif ada tiga fungsi, fungsi *budgeting* ya di APBN kebetulan ini sedang berlangsung, kedua adalah fungsi legislasi membuat undang-undang dan ketiga adalah fungsi pengawasan, ada fungsi presentasi juga dan sebagainya.

Yakni agenda hari ini adalah satu progress pembangunan kawasan industri dan nanti secara spesifik sudah barang tentu yang berkaitan dengan yang hadir hari ini dan kedua lain-lain.

Bapak-Ibu sekalian yang terhormat.

Bahwa hari ini hadir dalam rapat ini sejumlah 16 anggota dari 7 fraksi, dengan demikian sebagaimana dalam Tatib kita rapat ini telah dinyatakan kuorum dan bahwa setiap rapat pada prinsipnya bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu pimpinan meminta persetujuan anggota agar rapat ini dilaksanakan sesuai ketentuan protokol dan bersifat terbuka, Bapak-Ibu setuju?

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* rapat dengar pendapat kali ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.30 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Bapak-Ibu yang kami hormati.



Untuk sebelum dilanjutkan kita sepakat bahwa rapat ini akan berlangsung kurang lebih 2 jam dari sejak kita mulai rapat ini, yakni kurang lebih pukul 16.00 WIB dan apabila diperlukan nanti bisa diperpanjang, setuju Bapak-Ibu sekalian?

(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Bahwa perkembangan industri kelompok logam, mesin, alat transportasi dan elektronik mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi. Pada kuartal 1 tahun 2023 tercatat tumbuh sebesar 14,23% *year on year*, berarti ini melampaui pertumbuhan rata-rata nasional ekonomi kita yang kisaran antara 5,03. Jadi betul capaian ini sesuatu yang harus kita apresiasi karena berhasil melampaui berbagai ukuran pertumbuhan ekonomi, diantaranya pertumbuhan ekonomi secara rata-rata adalah 5,03%.

Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi sektor ILMATE industri logam dan seterusnya dengan berbagai grand strategi atau strategi besar, baik melakukan substitusi impor, peningkatan ekspor maupun hilirisasi untuk mengoptimalkan nilai tambah di dalam negeri. Rencana strategi ini perlu ditunjang sejumlah persyaratan, seperti ketersediaan dan rantai pasok bahan baku yang kompetitif, selanjutnya juga menyangkut investasi dan juga teknologi, tenaga kerja serta keberagaman pabrik yang efisien dalam tata kelolanya. Setidaknya sebagaimana kita kenal dengan ESG (*Environment Social and Governance*).

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Lokasi pabrik yang terintegrasi menjadi sangat penting bagi industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronik. Pemerintah saat ini terus melakukan pembangunan sejumlah kawasan industri untuk peningkatan daya saing industri manufaktur nasional.

Komisi VII DPR RI ingin melakukan pendalaman terkait dengan proses pembangunan kawasan industri yang tengah terus berlangsung, dalam hal ini Indonesia Morowali Industrial Park atau yang sering kita sebut IMIP, Indonesia Weda Bay Industrial Park, PT Anugerah Tambang Industri serta Kawasan Industri Sadai ini PT Rotation Bangka Abadi.

Selain itu untuk mengetahui perkembangan capaian target, Komisi VII juga ingin memastikan bahwa pembangunan kawasan industri yang tengah berlangsung tersebut sesuai dengan tata ruang, peruntukan pertanahan dan juga memenuhi kaidah-kaidah lingkungan dan sebagaimana yang saya sebut tadi, hari-hari ini kita sering disebut ESG.

Selain itu Bapak-Ibu sekalian, Komisi VII DPR RI juga ingin mendapatkan pandangan dari pelaku pengembangan kawasan industri termasuk kendala-kendala yang dihadapi. Jadi Bapak-Ibu sekalian, forum ini



sekaligus silakan tumpahkan apa yang menjadi kendala-kendala tetap dalam kerangka yang memang sesuai dengan bagaimana membangun industri yang ideal.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Untuk efektifnya waktu kami persilahkan Dirjen ILMATE dan Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian untuk menyampaikan pemaparannya terkait dengan agenda hari ini.

Dipersilahkan yang Bapak, dimana lebih dulu siapa dipersilakan.

DIRJEN KPAII KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (EKO S.A. CAHYANTO, S.H., LL.M.):

Terima kasih Pak Ketua Komisi VII yang kami hormati,

Pimpinan Komisi VII yang kami hormati,
Anggota Komisi VII yang kami hormati.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.*

Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang telah mengundang kami bersama dengan 4 kawasan industri, yang merupakan kawasan industri binaan dari kami untuk hadir di sini melakukan rapat kerja bersama dalam rangka pendalaman terkait dengan pengembangan kawasan industri, khususnya kawasan industri berbasis smelter.

Langsung saja sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, salah satu upaya untuk mengembangkan dan menyebarkan industri ke seluruh wilayah NKRI dilakukan melalui konsep perwilayahan industri. Jadi kami di Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, juga melakukan kegiatan pembinaan usaha yaitu kawasan industri.

Pelaksanaan konsep perwilayahan industri itu terdiri dari wilayah pusat pertumbuhan industri, penetapan kawasan peruntukan industri yang selaras dengan rencana tata ruang wilayah di setiap daerah, serta pembentukan dan penetapan kawasan-kawasan industri, kawasan tertentu serta sentra industri kecil dan menengah, yang ketentuan dan regulasinya telah diatur masing-masing.

Selanjutnya, dalam rencana induk pembangunan industri nasional sampai tahun 2035 salah satu sasaran pengembangan wilayah industri adalah menargetkan adanya peningkatan, peningkatan peran industri pengolahan



nonmigas di wilayah luar Jawa menjadi 40%. Jadi sampai hari ini situasinya memang sebagian besar kawasan-kawasan industri ini masih berlokasi di Pulau Jawa, meskipun dengan tambahan nanti ketika sekitar 24 kawasan industri di luar Pulau Jawa beroperasi ini akan semakin lebih berimbang.

Untuk mencapai hal tersebut diupayakan mulai pembangunan kawasan-kawasan industri baru dengan prioritas pengembangan tentunya di luar Pulau Jawa dengan penyediaan lahan sekitar 50.000 hektar.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat.

Lanjut, pengembangan kawasan industri secara nasional dimulai dari generasi pertama sekitar tahun '70-an, kalau bisa dilihat ini saat ini kawasan-kawasan industri ini merupakan kawasan industri yang dikelola dan dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara, hampir semua berada di Pulau Jawa, di luar pulau Jawa ada di Medan dan di Makassar. Kemudian di tahun '90-an muncul kawasan-kawasan industri generasi kedua yang dikembangkan oleh swasta dan kemudian kawasan industri modern yang kemudian mulai berkembang sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, yang terus beradaptasi dan saat ini sebagian kawasan industri baru sudah mengadopsi teknologi industri 4.0. Secara perwilayahan, kawasan industri di luar Jawa diarahkan, antara lain menjadi kawasan industri berbasis industri pengolahan sumber daya alam, memiliki sistem logistik yang efisien, serta sebagai pendorong perkembangan pusat ekonomi baru.

Hal tersebut seperti halnya upaya pengembangan beberapa kawasan industri yang akan kita bahas dalam rapat ini, yaitu IMIP, API, IWIP dan KI Sadai di Bangka Selatan. Ke depannya kami berharap kawasan-kawasan industri yang telah ada dan saat ini dikembangkan diarahkan menuju *smart eco industrial park*. Kami saat ini memiliki program yang bekerja sama dengan beberapa negara maju untuk mengadopsi *global eco industrial park principal*, sehingga daya saing kawasan-kawasan industri kita bisa lebih tinggi lagi dalam melayani *tenant-tenant*-nya yang *smart* ke depan, ini diharapkan aspek *sustainability* dan *green*-nya bisa lebih cepat tercapai.

Hingga Mei tahun 2023 total perusahaan kawasan industri menurut data Kementerian Perindustrian yang telah memiliki izin usaha kawasan industri sebanyak 136 kawasan industri dengan total luas lahan 71.408 hektar dan saat ini sekitar 63%-nya sudah terisi. Dari luasan ini dari yang sudah terisi ini sebagian besar ada di pulau Jawa, jadi mohon izin Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat. Saat ini sebagian besar kawasan industri memang masih berada di Pulau Jawa. Kalau kita lihat lebih dalam lagi sebagian besar berada di Jawa Barat, kalau dalam lagi kita lihat ini hanya ada di 2 lokasi Pak, yaitu di Bekasi dan Karawang. Ini yang kami harapkan memang kita bisa mendorong persebaran kawasan-kawasan industri ini bisa menjadi lebih keluar Pulau Jawa. Di mana pusat-pusat ekonomi baru bisa lebih tumbuh, oleh karena itu kami hanya mendorong proyek-proyek strategis nasional terkait dengan kawasan industri itu di luar pulau Jawa.

Saat ini kalau dilihat secara statistik kami berharap dengan adanya, tadi tambahan sekitar 24 kawasan industri akan segera beroperasi, ini akan bisa lebih menyeimbangkan porsi antara Jawa dan luar Jawa.

Selanjutnya terkait dengan pengembangan kawasan industri prioritas yang berada dalam status di RPJMN dan PSN, ini pemerintah telah menetapkan 27 kawasan industri masuk dalam RPJMN 2020-2024. Kemudian 23 kawasan industri lain masuk dalam status PSN, ada 9 kawasan industri yang sekaligus berada di keduanya baik di RPJMN maupun PSN. Dari total 41 kawasan industri tersebut, 17 diantaranya telah memiliki izin usaha kawasan industri dan operasional, 6 kawasan industri dalam tahap pembangunan, serta 15 lainnya dalam tahap perencanaan dan pengembangan. Adapun dari jenis industrinya terhadap 9 kawasan industri yang berbasis smelter, smelter nikel maksudnya di mana 4 diantaranya telah beroperasi dan 5 lainnya dalam tahap pengembangan.

Kami perlu sampaikan Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat, minggu lalu kami baru saja mengumpulkan Kepala Dinas Perindustrian dan Kepala Dinas Tata Ruang di seluruh Indonesia untuk memberikan bimbingan teknis lebih dalam lagi karena kalau kita perhatikan dari seluruh kawasan industri yang sudah beroperasi ini ternyata dari 514 kabupaten kota yang ada baru berada di 55 kabupaten kota, baru 55 kabupaten kota.

Nah ini kami harapkan wilayah-wilayah yang lain juga sudah bisa segera melihat kembali, mencermati kembali tata ruang wilayahnya masing-masing karena sampai saat ini masih terdapat, kami boleh sampaikan laporan bahwa terdapat 337 kabupaten kota yang telah memiliki Perda lengkap dan jelas, baik di batang tubuh maupun di lampiran pola tata ruangnya mengenai lokasi dan luas kawasan peruntukan industri. *Nah* kawasan peruntukan industri ini adalah lokasi, di mana kawasan-kawasan industri itu bisa berada atau apabila belum ada kawasan industrinya, industrinya bisa berada.

Kemudian terdapat 6 kabupaten kota yang menyebutkan luas dan lokasinya di batang tubuhnya, tetapi tidak tercantum di dalam lampiran di pola tata ruangnya. Kemudian ada 148 kabupaten kota yang hanya menyebutkan lokasinya saja di batang tubuhnya tanpa menyebutkan luas, termasuk tidak tercantum di dalam lampirannya. Kemudian masih ada 15 kabupaten kota yang tidak memiliki kawasan peruntukan industri, tidak disebutkan baik di batang tubuh maupun di lampiran Perdanya. Kemudian masih ada juga 8 kabupaten kota yang tidak kami tidak mendapatkan informasi, apakah terdapat kawasan peruntukan industri di dalam tata ruangnya.

Nah ini yang saat ini masih menjadi perhatian besar bagi kami untuk mendorong teman-teman di daerah segera mencermati kembali Perda mengenai tata ruangnya agar kita bisa menata dan mendorong persebaran kawasan-kawasan industri ini di luar Pulau Jawa.

Selanjutnya terkait dengan profil kawasan industri yang ada, yang bersama kami hadir di sini ada 4 kawasan industri. Mungkin nanti akan lebih

jelas lagi masing-masing kawasan industri bisa menjelaskan detailnya, yang kami bisa sampaikan bahwa seluruh kawasan industri yang 4 ini sudah memiliki izin usaha kawasan industri dan saat ini sudah beroperasi. Untuk 4 kawasan industri ini, Indonesia Morowali Industrial Park sudah terisi lebih banyak *tenant* dan saat ini dalam pengembangan untuk perluasan kawasannya. Kemudian di Indonesia Weda Bay Industri Park juga sudah beroperasi dan masih ada beberapa *tenant*-nya yang akan segera beroperasi secara komersial. Sementara untuk di Anugerah Tambang Industri dan Ration Bangka Abadi saat ini dalam proses konstruksi.

Demikian yang bisa kami sampaikan kepada Pimpinan dan Komisi VII yang terhormat, kami mohon arahan selanjutnya.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dilanjutkan dari Dirjen ILMATE yang mewakili, dipersilakan.

DIRJEN ILMATE KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI:

Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita semuanya.

Yang kami hormati Bapak Ketua dan Pimpinan Komisi VII DPR RI, Bapak-Ibu Anggota Dewan yang terhormat, Bapak Dirjen ILMATE, Bapak-Ibu Direktur Utama Perusahaan Kawasan Industri yang hadir di sini, serta Bapak-Ibu hadirin sekalian.

Pertama-tama, kami sampaikan salam dan permintaan maaf Pak Dirjen ILMATE sedianya beliau akan hadir di sini sendiri Pak, tetapi pada saat yang bersamaan beliau ditugaskan untuk mendampingi pimpinan untuk kunjungan kerja ke Surabaya, sehingga kami diminta untuk mewakili beliau hadir di sini.

Bapak Ketua dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Sebagaimana disampaikan oleh Pak Dirjen KPAIL tadi bahwa pembangunan kawasan industri secara bertahap telah berhasil mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah, khususnya penyebaran industri di luar Pulau Jawa dapat lebih dipercepat. Tentunya kami sangat mendukung pembangunan kawasan industri yang terus berkembang di seluruh wilayah Indonesia, di mana pengalokasian dan pemusatan industri dapat dilakukan secara terencana dan terukur. Demikian pula dukungan



infrastruktur, seperti transportasi, energi, air, tenaga kerja, bahan baku dan sebagainya dapat direncanakan lebih awal.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua tadi bahwa *tenant-tenant* di kawasan industri ini kebanyakan adalah berbasis sumber daya alam. Di industri yang hadir di sini, kami laporkan bahwa nanti mohon dibetulkan, yang berbasis sumber daya alam misalnya di Kawasan IMIP itu terdapat 46 *tenant*, di mana yang sudah beroperasi sebanyak 15 perusahaan dan konstruksi sebanyak 31 perusahaan, jadi ini masih, kebutuhan akan kawasan industri masih sangat besar. Kemudian di IWIP terdapat 34 *tenant* yang berbasis sumber daya alam dan beroperasi 14, sedang **konstruksi** 20. Untuk Kawasan Industri Sadai dan Anugerah Tambang Industri ini masih dalam tahap konstruksi, saya kira belum ada tenant yang beroperasi di sana.

Bapak Ketua dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Tentunya kami akan memaksimalkan pengawalan dan pengendalian terhadap banyaknya kawasan industri yang sudah ada dan *tenant-tenant* yang ada agar terus *comply* dengan peraturan yang berlaku, terutama dalam sumber daya manusia, pemanfaatannya, manajemen energi sampai kawasan industri, perizinan, data dan lain sebagainya. Khusus untuk data ini penting karena diwajibkan oleh ketentuan perundangan bahwa setiap industri yang beroperasi maupun kawasan industri yang beroperasi harus melaporkan datanya di SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional), sehingga dengan data itu kita bisa menganalisis, melakukan hal-hal yang diperlukan dalam menyusun kebijakan terkait dengan pengembangan industri.

Tentunya kami akan terus mendorong penumbuhan dan terjadinya hilirisasi industri di dalam negeri yang lebih dalam lagi, sehingga nilai tambah yang dihasilkan semakin besar bagi pengusaha, masyarakat dan negara.

Demikian yang dapat kami sampaikan, selanjutnya mohon arahan lebih lanjut pada Bapak-Ibu sekalian.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak-Ibu sekalian.

Terima kasih dari Dirjen KPAIL dan juga dari Dirjen ILMATE.

Tadi telah menyampaikan beberapa paparan yang pada intinya adalah bahwa kita semuanya berkomitmen untuk bahwa sektor industri ini harus menjadi juga bagaimana pengungkit pertumbuhan ekonomi kita yang berkeadilan, dengan memenuhi kaidah-kaidah sebagaimana tadi disampaikan.



Baiklah, Bapak-Ibu sekalian terima kasih.

Untuk itu tiba gilirannya Anggota Komisi VII akan mendalami berbagai masalah yang menjadi *concern* kita bersama, yang intinya kita akan menjadikan forum ini adalah sebuah pola interaktif yang saling terbuka, saling memberi masukan, saling asih, asah, asuh sehingga nanti usai rapat ini adalah ada sebuah masukan, ada sebuah solusi yang bisa kita tanggung jawabkan bahwa itu adalah yang terbaik bagi negara, bangsa ini, saya kira itu.

Terima kasih sekali lagi apa yang disampaikan, tiba gilirannya dipersilahkan yang terhormat dari Fraksi PDIP kalau ada.

F-P. NASDEM (RICO SIA):

Pimpinan, izin Pimpinan.

Di sini ada PPT *power point* dari masing-masing perusahaan, apakah mereka ingin menyampaikan.

KETUA RAPAT:

Oke, kalau begitu kita sebelum kita ini, kita gilir lagi dari masing-masing kawasan industri begitu, singkat-singkat aja ya.

Dipersilakan pertama dari IMIP atau ya IMIP, saya mohon maaf, saya 1,5 bulan yang lalu kebetulan saya melintas di atas ini sungguh luar biasa kawasan ini. Meskipun ini nanti mungkin dibahas selanjutnya kok pantainya merah, nanti mudah-mudahan bisa dijelaskan bahwa itu tetap memenuhi kaidah-kaidah sebaagaimana disyaratkan dalam lingkungan, tapi nanti.

Dipersilakan dari IMIP.

DIR. OPERASIONAL PT IMIP:

Baik Pak, terima kasih Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om swastiatu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua,
Selamat siang.*

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI,
Yang terhormat Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian atau yang mewakili,
Yang terhormat Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian Republik Indonesia,
Yang terhormat Bapak-Ibu Pimpinan Perusahaan Smelter yang turut hadir pada RDP hari ini, dan
Yang terhormat Bapak-Ibu Saudara-Saudari peserta RDP pada hari ini.



Mohon izin Pak memperkenalkan diri kami, turut hadir pada kesempatan ini Direktur Utama kami Mr. Wu Huadi, beliau dan saya sendiri Irsan Wijaya sebagai Direktur Operasional Kawasan Industri IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah.

Selanjutnya perkenalkan kami menyampaikan sekilas gambaran umum tentang kawasan industri kami, sebagai berikut. Itu profil umum kawasan kita Pak, saat ini kita berada di Sulawesi Tengah total luas wilayah kawasan kami 2.000 dan akan dikembangkan menjadi 4.000. Saat ini punya 52 *tenant* dengan komposisi 25 sudah beroperasi plus 27 dalam proses konstruksi dan pengurusan aspek legalnya.

Di dalam kawasan industri kami terdapat 4 kluster khusus :

1. NPI,
2. *Carbon steel*,
3. *Stainless steel*,
4. Bahan baku pendukung baterai kendaraan listrik.

Infrastruktur yang sudah kami punyai saat ini, pelabuhan laut dengan kapasitas 80 juta ton per tahun, bandara udara khusus 1.890 meter sedang diurus perpanjangan menjadi 2.250 meter Pak, akomodasi apartemen, mess dan wisma bisa menampung sekitar 16.000 orang. Kapasitas pelayanan Politeknik kami 20.000 orang per bulan, ada PLTU yang sudah beroperasi 3.927 megawatt, sedang dalam pembangunan 1.900 megawatt, air bersih 6.000 liter per detik Pak, jumlah tenaga kerja untuk TKI yang *pay roll* perusahaan 72.815 orang, kontraktor lokal 18.766 orang, total TKI seluruhnya 91.581 orang, tenaga kerja asing ada 11.615 orang.

Proporsi pekerja berdasarkan daerah asal, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, Pulau Sulawesi itu ada di Kabupaten Morowai 27%, Provinsi Sulawesi Tengah Morowali 11% lagi, lanjut Pulau Sulawesi 56%, non Pulau Sulawesi 6%.

program ahli keahlian yang telah dilakukan oleh perusahaan kami dalam rangka alih teknologi, Pak:

1. Pelatihan karyawan atau OJP/pelatihan keahlian dan pelatihan sertifikasi GNSP dan dari kementerian lembaga dan badan yang terkait.
2. Program *management trainee* dari perguruan tinggi terbaik di Indonesia, ITB, ITS, UGM, UI, Unhas Makassar, Unpad, Palu dan Unhalu Kendari, serta pendidikan dan pelatihan ke luar negeri.
3. Pendirian Politeknik Industri Logam Morowali bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian.

Komitmen Kawasan Industri bagi masyarakat sekitar melalui ESG adalah:

1. Ekonomi, dukungan bagi penguatan dukungan bagi pelaku UMKM setempat.
2. Lingkungan, dukungan bagi kegiatan pelestarian lingkungan sekitar,
3. Sosial-budaya, dukungan bagi pelestarian nilai-nilai masyarakat setempat,

4. Kesehatan, dukungan bagi kesehatan masyarakat sekitar,
5. Pendidikan, dukungan bagi peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas SDM masyarakat sekitar.

Kapasitas produksi kluster *stainless steel* yang sudah beroperasi, ini yang konstruksi ya, ini yang produksi, ini yang lagi produksi nikel pig iron 4,475 juta setara nikel murninya 413.000, *stainless steel slab* 4 juta, *stainless steel hot rolled coil* 3 juta, *stainless steel hot annealing pickling line* 2,8, *stainless steel cold rolled coil* 1,1 juta.

Kapasitas produksi untuk karbon steel saat ini ada 4.800.000 ton, terdiri dari:

- a. Wire 1,1
- b. Steel... (*suara tidak jelas 31.55*)... 1,6
- c. Slab 2,1
- d. Sedang konstruksi 2 juta.

Kapasitas produksi kluster komponen baterai yang masih dalam konstruksi adalah sebagai berikut:

- PT Chengtok Lithium Indonesia 50.000 *lithium hydroxide*, 10 ribu *lithium carbonate*.
- PT Hua Chin Aluminium Indonesia 500.000,
- PT CNGR Ding Xing Energy 50.000 Electrolytic Nickel,
- PT Zhongtsing New Energy 100.000 MPA metric ton per year,
- Indonesia Puqing Recycle Technology.

Kapasitas produksi kluster kokas :

- Kinrui New Energy Technologies Indonesia 2.600.000 metrik ton per year,
- PT Dexin Steel 3 juta metrik ton per year.

Kemudian kapasitas produksi kluster untuk kokas yang dalam konstruksi:

1. PT Risun Wei Shan Indonesia 4.800.000 ton,
2. PT Kinxiang New Energy Technology 3.900.000 metric ton per year,
3. PT Detian Coking Indonesia 4,4 juta.

Dampak ekonomi kawasan industri 52 perusahaan yang ada di kawasan industri kami sebagai berikut. Saya kira ini Pak, nanti saya kirim ya terlalu banyak untuk kita sebutkan ya nanti saya kirim.

Oke lanjut, nah ini akumulasi jumlah investasi yang ada sekarang pada tahun ini sekitar pembayaran pajak, pembayaran pajak dan royalti itu Pak ada nanti mungkin saya juga akan memberikan catatannya kepada pimpinan dan anggota.

Terima kasih, demikian Pak yang dapat kami sampaikan dari PT IMIP.



KETUA RAPAT:

Iya selanjutnya IWIP ya.

DIRUT PT IWIP (SCOTT):

Selamat siang,
Assalammu'alaikum.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat.
Pimpinan yang terhormat dari Kementerian Perindustrian,
Bapak dan Ibu sekalian.

Saya Scott Direktur dari IWIP. Saya sangat senang bisa diundang ke sini untuk melakukan pendalaman IWIP. IWIP berlokasi di Maluku Utara Weda Bay adalah perusahaan yang muda umurnya 4,5 tahun. Kami memulai pembangunan tahun Agustus 2018, setelah 9 bulan bandara khusus kami yang panjangnya 1.650 meter jadi bisa mendarat untuk pesawat kami. Di bulan Januari 2020, pertama pelabuhan untuk kapal besar beroperasi, setelah 3 bulan lagi bertambah PLTU berhasil beroperasi. Setelah orang, barang dan energi siap April 2020, pertama smelter beroperasi dengan sukses.

Tahun 2021 nilai ekspor mencapai 3 miliar USD, 2022 nilai ekspor melebihi 6 miliar US dolar, tenaga kerja mencapai 40 ribu. Beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden Jokowi bilang Maluku Utara GDP *growth rate* 27% paling tinggi.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua, yang di ekspor 6 miliar US dolar itu apa itu?

KETUA RAPAT:

Ya, begini, begini, mungkin juga karena penyampaiannya sekedar baca, jadi maknanya kurang disampaikan oleh, intinya kita menghormati upaya dari dirut untuk menyampaikan dengan Bahasa Indonesia tapi malah kurang, disilahkan saja Bapak yang bisa, sambil menjelaskan.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Kebetulan di buku juga nggak ada.

KETUA RAPAT:

Biar maknanya juga kena tidak sekedar baca.

GENERAL MANAGER PT IWIP (YUDI):

Iya, izin Bapak-Ibu, nama saya Yudi saya GM HR dan extra region.



Menanggapi pertanyaan Bapak bahwa di kawasan industri kami Pak, itu sekarang ini berdiri smelter feronikel. Artinya kami mengeksport dalam bentuk feronikel, memang di Indonesia kita belum bisa menjual feronikel dalam negeri maka kita ekspor untuk diolah menjadi produk lanjutan.

Kemudian kami juga akan membangun Pak, HPAL yang seperti tadi yang disampaikan di Morowali bahwa HPAL ini adalah bahan baterai yang kita sebut biasanya MHP (*Mixed Hydroxide Precipitate*) dari produk itu kita akan olah lagi nanti menjadi *nickel sulphide* dan *cobalt sulphide* sebagai bahan dari baterai.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi, feronikel ini berarti belum diolah ya?

GENERAL MANAGER PT IWIP (YUDI):

Feronikel itu adalah bahan untuk stainless steel Pak.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Iya belum diolah ini kan.

GENERAL MANAGER PT IWIP (YUDI):

Iya belum menjadi stainless steel.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Jadi ini kalau di ekspor ini hasil untuk negara berapa ini, 6 miliar itu berapa untung negara?

GENERAL MANAGER PT IWIP (YUDI):

Iya kira-kira tahun lalu kita membayar pajak sekitar hampir 3, 2,5 sampai 3T, Pak.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Maksud saya jangan kaya orang-orangnya aja, pajak barang itu saya juga punya perusahaan ya pegawai saya semua saya pajak, di pajak, bayar pajak juga. Tapi kalau material yang saya ekspor itu berapa hasilnya untuk negara, itu kan langsung digali itu dari bumi Indonesia, itu berapa kira-kira kita pengin tahu gitu.

GENERAL MANAGER PT IWIP (YUDI):

Izin Bapak, jadi untuk bahan mentahnya raw material di sini kita beli dari penambang atau dari IUP, untuk memproduksi nilai tadi itu perkiraan kami tahun lalu kita membutuhkan 50 juta ton OR basah.

F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Izin Pimpinan, sedikit tambahan.

Bapak saya pengen tahu, Bapak punya feronikel itu kadar berapa persen?

GENERAL MANAGER PT IWIP (YUDI):

Feronikel kita itu berkadar variasi antara 4 sampai, 14 sampai 15%.

F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Berapa persen?

GENERAL MANAGER PT IWIP (YUDI):

14 sampai 15% Pak, jadi memang aplikasi yang dibutuhkan untuk kelanjutannya yaitu dalam bentuk stainless steel memang kira-kira seperti itu karena stainless steel yang paling *advance* pun kontennya hanya 16%.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Saya gini Pak, dari material yang di ekspor nih feronikel yang 6 miliar US dolar ini pajaknya berapa ini untuk negara, hanya dari situ aja, *gitu*.

GENERAL MANAGER PT IWIP (YUDI):

Iya, jadi kalau royalti izin Bapak. Royalti memang kita membeli barang, artinya OR yang akan kami olah yang kira-kira 50 juta ton tadi itu dibayar oleh penambang, dari perusahaan IUP. Seandainya kita misalkan ini Pak ya rata-rata begitu ya kalau harga OR ini 40 US dolar dikalikan 50 juta, artinya ada sekitar 2 miliar, iya Pak, izin, dolar Pak.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Jadi PNBP-nya ini ada berapa, nanti bisa kita cek.

GENERAL MANAGER PT IWIP (YUDI):

10% memang bukan dibayarkan oleh kami.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Berapa itu PNBPN-nya yang dibayar?

GENERAL MANAGER PT IWIP (YUDI):

10% dari nilai tambangnya Pak, nilai komoditas tadi ya. Jadi bukan feronikelnnya Pak, tapi izin Pak, bijih nikelnya yang kami beli, itu dibayar oleh penambang sekitar kira-kira 40 Pak ya, 40 US dolar per ton kira-kira Pak, iya Pak nanti bervariasi ada harga HPM-nya, iya. Selain itu kita juga membeli banyak batubara Pak, untuk pembangkit listrik kami, itu kita beli kira-kira sampai 12 atau 13 juta ton untuk *thermal coal*-nya.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak, karena begini Pak ini PNBPN ini rendah kita tahu, baik batubara maupun nikel, barangnya sekali ekspor 6 miliar US dolar. Itu aja Pak Ketua, nanti di pendalaman dan ini kita harus TA tolong dicatat, jadi kita cek ke Kementerian ESDM, berapa setoran PNBPN dari ini, sekarang sudah harus begitu namanya pendalaman harus kita tahu karena yang kita perjuangkan adalah untuk rakyat hasilkan dari untuk negara, negara itu untuk rakyat. Kita kan utangnya nambah terus nih karena pembangunan perlu uang.

Itu aja Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Luar biasa Pak Ramson.

Silakan lanjutkan.

GENERAL MANAGER PT IWIP:

Izin Pak, saya melanjutkan saja. Jadi memang dalam proses produksi feronikel ini Pak, material yang kita beli dari Indonesia yaitu bijih nikel atau nikel OR tadi ditambah juga untuk mengolah itu adalah energi. Energi ini dari batubara karena kita masih memakai PLTU, batubara pun kita beli dari Kalimantan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Selain itu kita masih membeli beberapa apa namanya kokas, semi cold yang juga ada dari Indonesia maupun dari negara lain.

Nah untuk itu mungkin selain tadi kita akan apa namanya membuat industri baterai, kemudian juga kita akan membangun juga selain PLTU juga bangunan energi yaitu tenaga surya maupun tenaga bayu, dan di tempat kami yang berinvestasi itu dari berbagai macam negara, Pak. Jadi ada dari Indonesia yaitu kita ada PT Antam, selain PT Antam juga ada Harum Grup dan juga dari HSM (Halmahera Sukses Mineral) adalah penambang di daerah tersebut yang juga membangun smelter di tempat kami. Selain itu ada EraMed dari Perancis, Angel Nikel dari Australia atau nikel industri dari Australia, kemudian Jindal dari

India, ... (suara tidak jelas 44.59)... dari Korea dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya Cina yang berinvestasi tapi juga semua perusahaan yang ada di dunia.

Kemudian dari 40 *tenant*, 42 *tenant* yang sudah memproduksi, *tenant* yang ada 20 *tenant* sudah memproduksi, 22 sedang mendirikan atau berkonstruksi.

Kemudian dari aspek ketenagakerjaan, izin Bapak Pimpinan, ini saya rasa kami dari Maluku Utara kami sangat apa namanya hari ini, ya dengan adanya PT IWIP ini dari 2018 kita mulai sekitar pertengahan tahun yaitu Agustus, sekitar 500 orang kita mulai, kemudian setiap tahunnya kita menambah kira-kira 5 sampai 6.000, dan hari ini kita sudah sekitar hampir 47.000, akhir tahun kita berharap sampai dengan 50.000, kemudian tahun depan 60.000 dan tahun 2025 70.000.

Jadi saya ingin sampaikan bahwa ini adalah karyawan yang kami rekrut sekitar 75% Pak dari lokal, artinya dari Halmahera Tengah, Halmahera Timur, ada sekitar 25 desa kalau saya nggak salah itu merepresentasikan 42% dari karyawan kami. Kemudian dari kabupatennya Kalteng dan Kaltim itu sekitar hampir 7%, sisanya dari semua kabupaten di Maluku Utara 26% dan Indonesia timur mungkin dari Manado, Makassar, Ambon dan lain sebagainya sekitar 20%, sisanya dari mungkin Jawa, Sumatera atau Kalimantan, kira-kira seperti itu Pak.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua, satu lagi aja yang tadi nanti tolong dijawab dikirim ke Pak Pimpinan terus ke sekretariat.

Terus yang kedua dari tenaga kerja tadi berapa puluh ribu orang, Pak?

GENERAL MANAGER PT IWIP:

Sekarang ini kita 47 ribu orang.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Nah itu berapa puluh ribu orang yang di atas PT KP? Artinya kadang-kadang dibuat strateginya itu gajinya gaji-gaji UMR atau dibawah PT KP, sehingga nggak kena pajak. Itu kita pengin tahu aja itu memang kebijakan perusahaan, tapi kita juga pengen tahu soal bagaimana efektivitas pembangunan ini untuk rakyat gitu karena kalau meningkat penghasilan tenaga kerja akan meningkatkan konsumsi masyarakat Pak, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Nah itu nanti tolong diberitahukan, Pak. Terima kasih, Pak Ketua.

GENERAL MANAGER PT IWIP:

Nanti kita akan seperti sampaikan Pak, nanti kita akan susulkan.



KETUA RAPAT:

Jadi betul apa yang dicatat oleh Pak Ramson nanti tadi tentang PNBP, tentang seterusnya angka-angka tadi.

Ya, terima kasih dari.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):

Izin Ketua, sebelum dilewati kepada yang lain, ada yang mau minta konfirmasi.

PT Indonesia Weda Bay Industri itu pengelola kawasan ya, Pak?

GENERAL MANAGER PT IWIP:

Betul sekali, Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):

Memiliki smelter?

GENERAL MANAGER PT IWIP:

Tidak Pak, *tenant* yang punya smelter, Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):

Tidak memiliki smelter?

GENERAL MANAGER PT IWIP:

Iya karena KBLI itukan sekarang harus menempel di dalam PT-nya, jadi kawasan industri PT IWIP kemudian *tenant-tenant*-nya nanti PT-PT yang

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):

Yang memiliki smelter?

GENERAL MANAGER PT IWIP:

Betul.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):

Oke, terima kasih.

GENERAL MANAGER PT IWIP:

Boleh saya lanjut?

KETUA RAPAT:

Oh iya.

GENERAL MANAGER PT IWIP:

Kami juga melakukan *training-training*, *training* ini adalah *training-training* yang kita berikan kepada tenaga kerja lokal, seperti Welder, Loader, operator excavator, DT dan lain sebagainya. Sekedar informasi kami sudah *men-training* sekitar 24.644 atau kira-kira mendekati separuh dari pegawai kami. Jadi selama *training* 3 bulan kami berikan akomodasi makan dan penginapan, selain itu setelah lulus dari *training* kita rekrut mereka menjadi tenaga kerja kami. Tenaga kerja kami paling rendah itu bergaji antara 6,5 juta sampai 7 juta, di mana di situ ada komponen gaji pokok dan tunjangan tetap, serta lembur ataupun tunjangan lainnya.

Kemudian untuk ESG Bapak Ketua, kami juga memperhatikan masalah lingkungan hidup. Jadi lingkungan hidup yang sudah kami perbaiki di lokasi antara lain adalah penanaman ulang coral dan hutan bakau juga kita rehabilitasi, kemudian pengelolaan air limbah produksi, kemudian juga kita memanfaatkan sisa hasil produksi yaitu sliik sebagai bahan untuk bangunan untuk jalan, untuk batu bata dan lain sebagainya yang dipakai juga dengan penduduk, Pak. Kemudian juga rehabilitasi lahan kritis sekitar tambang atau industri, kemudian juga untuk rehabilitasi daerah aliran sungai.

Selain itu *next*, kita juga melakukan CSR dan UMKM. Untuk kegiatan CSR ini kita *men-cover* kira-kira 35 desa di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, kita fokus pada Pendidikan, kesehatan, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat melalui skema UMKM. Untuk pendidikan, kita membantu fasilitas infrastruktur 30 sekolah di Halteng dan Haltim, nanti membantu program kejuruan setara D3 untuk masyarakat sekitar dengan bantuan dari Kementerian Perindustrian dan juga memberikan beasiswa untuk masyarakat atau siswa berprestasi di sekitar wilayah kami.

Kemudian untuk kesehatan, kami juga membangun rumah sakit daerah Weda, juga kita juga membantu masyarakat sekitar dan pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan covid di tahun 2020 dan 2022. Kemudian kita juga memperhatikan kebutuhan masyarakat untuk masjid, gereja serta perayaan-perayaan agama setempat, serta yang terpenting adalah UMKM. Kami membeli hampir semua bahan makanan, seragam, kemudian bahan-bahan kayu, bahan bangunan dari UMKM di daerah dan kira-kira tahun lalu sekitar hampir 500M kita belanjakan, tahun ini kita berharap bisa mencapai 600 miliar. Kami juga menandatangani beberapa MoU dengan UMKM setempat.

Saya rasa itu laporan dari kami Bapak, mohon ijin apabila ada yang salah, kurang dari penyampaian kami, nanti akan kami sampaikan via Kementerian Perindustrian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ya, dilanjutkan PT Anugerah Tambang Industri.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):

Izin Pimpinan, saya melihat dari presentasi dari PT Anugerah Tambang Industri ini masih belum operasi ya Pak, belum operasi sama sekali ya. *Nah* sebelum Bapak sampaikan rencana ke depan, kami ingin meminta klarifikasi dulu.

Izin Ketua, klarifikasi terhadap surat dari Kementerian Agraria wilayah Sulawesi Tengah terhadap tumpang tindih dari lahan yang akan dijadikan rencana sebuah kawasan ini ya terhadap sengketa tanah dengan Mega Nur Prima Berkas Mineral dan juga dengan perkebunan yang ada Kutai Palm Plantation dan sebagainya, termasuk juga sejauhmana ya Bapak-bapak merespon. Ini kan investasi cukup besar ya Pak kan gitu, jangan nanti kita kan *nggak* mau, negara kita negara hukum ya, negara kita mengedepankan ya dan menjunjung tinggi aturan peraturan. Tentunya kami dari legislatif tentu ingin tahu, ingin tahu sejauhmana penyelesaian sebelum, kita kan *nggak* mau mendengar dan ditanya kita pro mana ini, pro aturan atau pro pengusaha yang nakal kan gitu, Pak.

Nah ini kita ingin, izin Ketua supaya mereka dapat memberikan sebuah klarifikasi maupun konfirmasi kepada kita termasuk juga dengan somasi yang disampaikan oleh ... (*suara tidak jelas 54.40*)... terhadap PT Anugerah.

Itu Ketua, sebelum mereka sampaikan.

KETUA RAPAT:

Jadi begini ternyata betul ini belum beroperasi ya, ini baru mau merancang bagun sebuah kawasan industri begitu. Jadi betul, nanti coba setelah ini ditanggapi ya atau langsung Pak yang terhormat.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):

Langsung saja Pak, bagaimana mereka menyampaikan sesuatu sementara mereka punya masalah besar di sana.

KETUA RAPAT:

Iya coba sampaikan yang disampaikan yang terhormat dari Pak Nasril tadi yang tumpang tindih status tanah dan sebagainya, dan sebagainya.

Dipersilakan.

DIRUT PT ANUGERAH TAMBANG INDUSTRI:

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII,
Yang kami hormati juga Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI.
Kepada yang terhormat Bapak Dirjen KPAIL dan Bapak Dirjen ILMATE.

Jadi perlu juga kami jelaskan Pak mengenai apa yang tadi menjadi, apa yang disampaikan oleh Pak, mohon maaf Pak Nasrun, Pak Nasril ya Pak, mengenai tumpang tindih. Memang pada awal pertama kali kami mengajukan izin lokasi kawasan industri ini rupanya di sana terdapat juga ada IUP, ada ada 3 IUP pertambangan, yaitu Mega Nur, Prima Berkat Mineral Abadi, Prima Berkat Mineral (PBM), terus kemudian ada 2 IUP yaitu izin usaha perkebunan Pak, yaitu Ismu Azzam dan KPP (Kutai Palm Pantation).

Nah, kemudian kami sudah berkoordinasi dengan Pak Bupati dan segala macam untuk apa namanya melakukan apa namanya agar lahan itu bisa *clear and clean* Pak, karena lahan itu sudah kita bebaskan. Kemudian kita juga pada saat itu dan sampai saat ini mengusahakan untuk dijadikan sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB).

Pada prosesnya kemudian PT Mega Nur oleh BKPM itu dicabut izinnya Pak ya dan mereka ada punya lahan seluas, mohon maaf berapa yang kita bebaskan dari Mega Nur. Mereka baru punya lahan Mega Nur itu hanya sekitar di bawah 5 hektar itu juga sudah kita beli Pak, kita bebaskan dan kemudian PT PBM maupun PT PMA pada saat itu juga dicabut izinnya karena mereka tidak aktif memproduksi oleh BKPM.

Untuk izin usaha perkebunan yang KPP maupun Ismu Azzam pada bulan Januari itu Bupati Morowali mencabut izin keduanya karena izin itu adalah dari apa kabupaten Pak Bupati karena dianggap bahwa 2 PT ini sudah hampir 10 tahun tidak ada kegiatan sama sekali dan secara tata ruang daerah yang kami lokasi lahan itu yaitu di Kecamatan Puungkeu Pesisir itu sudah dicadangkan untuk keperluan tambang dan kawasan industri, Pak.

Jadi apa yang kami ajukan pada saat itu kepada Bupati Morowali adalah sudah sesuai dengan tata ruang. Oleh sebab itu kemudian oleh pihak Kementerian ATR mereka menerbitkan PKKPL seluas 1.171 hektar pada pertengahan Bulan Januari Pak, Bulan Januari kemarin dan saat ini proses untuk finalisasi HGB sudah sampai juga di Kepala BPN.

Demikian Pak, yang perlu kami sampaikan.



KETUA RAPAT:

Iya *appreciate* setinggi-tingginya bahwa Saudara ditanya secara spontan mampu menjelaskan secara rinci. *Nah* kita berharap yang hadir di sini adalah memang beliau-beliau atau Bapak-bapak yang menguasai masalah. Jadi hal apa memang bisa dijelaskan secara rigid.

Jadi PT Anugerah ini baru rencana mau membuat kawasan begitu ya, jadi belum beroperasi kawasan itu sendiri. Bagaimana yang terhormat apakah kita persilakan untuk paparan juga atau kita lewati saja karena memang belum.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):

Nggak ada masalah Ketua, kita hanya meminta klarifikasi. Apapun yang beliau sampaikan hari ini, itukan terekam kalau terdapat kebohongan itu ya rekaman itu akan berputar.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baiklah, maksudnya kita lewati saja dari PT ini untuk tidak menyampaikan karena baru rencana begitu ya.

Dilanjutkan dengan PT Ration Bangka Abadi.

DIRUT PT RATION BANGKA ABADI (PURBA):

Yang terhormat Bapak Ketua, Bapak Pimpinan Komisi VII DPR RI,
Yang terhormat Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya.*

Nama saya Pak Purba panggilannya, atau sehari-hari Yanto Purba. Saya Direktur Utama Kawasan Industri Sadai. Posisi kawasan kami mungkin tidak jauh berbeda dengan sebelah kita, kita baru menyelesaikan infrastruktur dasar Pak, baru menyelesaikan pembangkit listrik pas Mei ini baru selesai, lahan, kita tidak masalah. Secara teknisnya untuk kawasan kita itu kita, untuk lahannya itu sudah sesuai dengan Perda Tata Ruang, baik kabupaten maupun provinsi untuk masa 2014 untuk 2034. Juga untuk di tata ruang di pusat juga kita juga menyusun tata ruangnya untuk kecamatan lokasi yang area kawasan industri ini ya nanti diposisikan menjadi kota baru Pak, dan itu sudah selesai EBTR-nya di tahun 2020. Jadi kita tidak RTRW lagi, sudah RDTR Pak, sudah rencana detail tata ruang.

Memang Pak Pimpinan menyusun kawasan industri ini prosesnya panjang sekali Pak, mulai dari FS, *master plan*, BED, AMDAL, penyusunan RTRW tata ruang. Dari RTRW ada turunan lagi Pak, rencana detail tata ruang, jadi prosesnya panjang sekali ini membutuhkan waktu 3-4 tahun untuk merangkum sebuah dokumen teknis, sehingga tidak jadi masalah di kemudian hari.

Kami termasuk yang berprestasi untuk tata ruangnya, tata ruangnya kebetulan Kabupaten Bangka Selatan termasuk yang terbaik Pak di Indonesia Pak. Jadi secara detailnya sudah diselesaikan Pak, iya silakan Pak, silakan Pak, silakan tata ruang kita sudah selesai semua Pak.

KETUA RAPAT:

Kenal Pak Bambang ya.

DIRUT PT RATION BANGKA ABADI:

Kenal baik, Pak.

Kendala kita untuk industri kita air Pak, karena air baku bukan kewenangan kami tapi kewenangan pemerintah. Itu hari ini baru dilaksanakan untuk persiapan konstruksi untuk air baku Pak, jadi itupun *support* anggaran untuk air baku dari pemerintah bukan dari APBN murni tapi sisa anggaran lelang tahun ini, Pak. Jadi itu kita, kami juga Anggota Himpunan Kawasan industri jadi kami meminta bantuan Himpunan Kawasan Industri untuk mendorong Menteri PUPR, tolong air kami dibantu karena selama kami persiapan konstruksi pembangkit listrik airnya kami beli pakai galon, Pak, pake tedmond. Jadi kami beli pake *tedmond* dalam proses pembangunan pembangkit listrik ini.

Mungkin secara itu yang bisa saya sampaikan Pak, posisi kita belum beroperasi penuh, kita masih dalam proses penyiapan infrastruktur dasar gitu.

Terima kasih Pak Pimpinan, terima kasih Bapak-Ibu Anggota Komisi VII lainnya.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sebelum di ... (*suara tidak jelas 01.04.01*)... Pak, Pak Dirjen proyek-proyek semacam ini masuk PSN (Proyek Strategis Nasional)?

DIRJEN KPAII KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (EKO S.A. CAHYANTO, S.H., LL.M.):

Tidak semua, Pak.



KETUA RAPAT:

Tidak semua ya, oke terima kasih.

Baiklah, Bapak-Ibu sekalian.

Dipersilakan kita dalam mungkin diawali dari Fraksi PDIP Pak Adian, yang terhormat.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Pimpinan yang terhormat dan semuanya yang sudah hadir di sini.

Apa, untuk BBIE ini saya mau nanya, ini yang investasi siapa saja ya, sudah ada belum? Artinya belum ada investor sama sekali?

DIRUT PT RATION BANGKA ABADI:

... (pembicara tidak menggunakan mic) ...

Pengolahan ... (suara tidak jelas 01.04.54)... termasuk industri B100, termasuk industri pengolahan ... (suara tidak jelas 01.04.59)...

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Saya bandingkan ini, maaf Pak ya saya bandingkan ini dengan Weda Bay. Itu dia menurut saya dia jelas ya yang akan investasi siapa saja, walaupun akan ada pertanyaan saya juga di situ. Ini kan Weda Bay kan di Lampung dia investor siapa saja ditulis di sini, apa sudah ada Huayue, Posco, CNGR, BSF segala macam gitu loh. Artinya bahwa memang ada kebutuhan investasi di situ baru dibuat kawasan industrinya, saya takutnya ini kawasan kita buat mangkrak nantinya kalau tidak ada investornya, apa menurut saya itu penting juga ya. Apa, walaupun misalnya baru rencana gitu ya Pimpinan, negara sudah habiskan sekian ratus miliaran misalnya, lalu tidak ada investasinya karena di sini yang ditulis hanya rencana industrinya, industri galangan kapal tapi industri galangan kapal perusahaan apa *nggak* ada, gitu loh. Kemudian industri peleburan thinner timah, perusahaannya mana, yang investasi siapa tidak ada, cuman nama-nama industrinya tok, nama perusahaan tidak ada.

Jadi sampai hari ini menurut saya belum ada investasi apapun yang sudah bersedia di situ, itu gimana tuh?

DIRUT PT RATION BANGKA ABADI:

Investasi yang sudah kami pernah lakukan Pak, satu pembebasan lahan *land sharing*, pembangunan.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Nggak investornya.

DIRUT PT RATION BANGKA ABADI:

Investornya kita ada Pak, dari ... (suara tidak jelas 01.06.24)... Grup Pak. Saat ini kita sudah juga berkirim surat ke BKPM, termasuk ke IGGF, PII dalam proses pengurusan untuk regulasinya. Regulasinya yang kita maksudkan begini, jika kami sebaagai investor menginvestasikan pembangunan kawasan industri di daerah ini, apakah proyek ini dalam masa konstruksi kami nanti 10 tahun akan dilanjutkan oleh pemerintah atau ketika masa bakti ini tidak.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Karena itu masalahnya begini loh, kalian buka kawasan industri oke, dasarnya itu karena memang ada akan ada mau investasi ke situ.

DIRUT PT RATION BANGKA ABADI:

Betul, Pak, betul.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Nah yang siap atau sudah bersedia investasi siapa ya?

DIRUT PT RATION BANGKA ABADI:

Sudah ada Pak dari ... (suara tidak jelas 01.07.09) ...

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Namanya nggak ada?

DIRUT PT RATION BANGKA ABADI:

Oya kita tampilkan, sudah ada Pak.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Bisa nanti diberikan?

DIRUT PT RATION BANGKA ABADI:

Iya bisa Pak, kita berikan.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Nggak maksud saya kan kita bisa cek juga, itu tolong dilengkapi Pak ya. Terus kemudian ini untuk IWIP ini, ini ada 2 BUMN di situ ya?



DIRUT PT IWIP:

Ada PT Antam, itu di tambangnya dan satu smelter.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Di tambang?

DIRUT PT IWIP:

Satu smelter.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Oke, jadi Antam bangun smelter di kawasan industri IWIP?

DIRUT PT IWIP:

Iya jadi ada 1 perusahaan namanya PT Weda Bay Nikel, PT tersebut dimiliki oleh Antam sebesar 10%. *Nah* mereka punya opsi untuk naik menjadi 40% di kemudian hari.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Oke, itu Weda Bay smelter.

DIRUT PT IWIP:

Iya jadi nama PT-nya *tenant*-nya namanya PT Weda Bay Nikel, kita tidak sebutkan di sini.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Kenapa?

DIRUT PT IWIP:

Ya karena ada beberapa *tenant*-nya sudah 42 Pak, jadi kalau nanti diperlukan bisa kita sampaikan dalam bentuk yang.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Bukan, berarti inikan bukan Antam yang besar dong sahamnya, Antam cuma 10%.

DIRUT PT IWIP:

Betul sekali Pak.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Terus BUMN kedua Posco.

DIRUT PT IWIP:

Posco dari Korea Bapak.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Iya, nggak Bang, Posco itu antara Korea sama apa Krakatau Steel, jadi ada 2 BUMN di sini.

DIRUT PT IWIP:

Ini mungkin begitu Pak, jadi ini ada Posco tapi setahu saya mungkin di dalamnya ada BUMN.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Iya Posco itu anak perusahaannya Krakatau Steel, iya *nggak* maksud saya kok saya jadi bingung, kenapa kemudian BUMN malah investasi di sini? Karena kan punya lahan sendiri, punya tambang sendiri, segala macam gitu loh atau ini cuma main-mainan saja agar seluruh produksi tambang Antam dijual ke sini.

DIRUT PT IWIP:

Saya tidak.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Tapi kalau saya tidak salah dengar Pak, kalau saya tidak salah dengar Bapak beli OR dari mana-mana.

DIRUT PT IWIP:

Betul, kita membeli OR dari mana-mana.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Oke, punya IUP?

DIRUT PT IWIP:

Kita tidak ada IUP dari PT IWIP hanya ada tadi satu *tenant* yang punya tambang gitu.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Iya, artinya bahwa ini terkait dengan Antam Pak karena kita memang sedang investigasi betul soal Antam, apa di Halmahera ini dia punya banyak sekali IUP.

Nah, menarik menurut saya kalau dia punya 10% sementara tambangnya sangat banyak, kadarnya sangat bagus di Halmahera itu. Kalau Bapak bilang cuma 10% ini lebih lucu lagi, yang dicantumkan nama BUMN yang cuma 10% investasinya di komposisi sahamnya.

Nah ada lagi Posco, setahu saya Posco itu perusahaannya Jawa Tengah atau Jawa Timur itu, iya *joint* dengan tapi di Jawa Bang, iya bisa di Jawa. *Nah* itu juga BUMN, ini jadi menarik kenapa BUMN justru investasi di sini, kenapa Antam tidak bangun smelter sendiri? Apakah ini upaya Antam untuk lari dari tanggung jawab dia membangun smelter atau bagaimana?

DIRUT PT IWIP:

Izin Bapak, kalau masalah Antam kami, yang sepengetahuan kami hanya memiliki 10% di salah satu *tenant* yaitu PT Weda Bay Nikel. Kemudian selebihnya detailnya apakah ini, tapi saya kurang memahami pertanyaan itu.

Kemudian kalau Posco ini Pak, setahu kami adalah perusahaan Korea yang mungkin dia di Krakatau Steel berinvestasi join dengan Krakatau Steel. *Nah* mereka memang ingin juga memiliki smelter di tempat kami, tetapi perusahaan ini yang afiliasi dari Korea begitu, Pak.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Iya Pak, kebetulan dirutnya sudah ketemu dengan saya Dirut Posco-nya ini, dia cerita banyak juga soal usahanya, segala macam. *Nggak* apa-apa saya cuma mau tahu saja keterlibatan Antam dan Posco di sini karena saya tahu betul di Halmahera ini banyak sekali IUP-nya Antam, itu.

Nah jadi kalau misalnya saya mau nanya sama Pak Dirjen yang terkait, ini berarti yang sudah jalan baru 2 dong ya?

DIRJEN KPAII KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (EKO S.A. CAHYANTO, S.H., LL.M.):

Mohon izin Pak, memang untuk karena konsep pembangunan industri itu melalui per wilayahan Pak, jadi kami bangun kawasan industrinya dulu, kemudian nanti baru industrinya masuk ke dalamnya, Pak. *Nah* ini dan ini kami sesuaikan dengan potensi sumber daya alamnya, jadi seperti misalnya di Ration Bangka itu karena di sana potensi sumber daya alamnya adalah timah dan silika, memang di tematik untuk di sana itu adalah, tematik untuk di Bangka itu adalah timah dan silika. Ini sekaligus mengantisipasi kita tidak akan terus lagi menjual bahan mentah lagi, sehingga perlu industrialisasinya.

Nah itu untuk itu diperlukan kawasan industri sebagai lokasi, di mana nanti industrinya berada, Pak.

Demikian.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Iya kalau yang Bangka ini kan yang saya tanya cuma kenapa sekian lama belum ada investor yang masuk.

DIRJEN KPAII KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (EKO S.A. CAHYANTO, S.H., LL.M.):

Iya masih ada permasalahan terkait dengan untuk air Pak, kebutuhan air bakunya. Ini masih belum mendapat lokasi yang dibutuhkan sesuai dengan permintaan dari calon *tenant*-nya.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Loh FS-nya sudah jalan, kenapa masih belum bisa. *Nggak* saya sebenarnya sederhana Pak, kalau untuk BBEI ini. Saya cuma bingung perjalanan sudah sekian panjang, satu investasi pun belum ada yang masuk, paling tidak dia tidak mencantumkan satu nama perusahaan pun yang sudah siap untuk investasi, yang baru dicantumkan adalah jenis produksinya. Menurut saya aneh gitu loh, walaupun kebiasaan sambil berjalan ya hiburilah kita dengan adanya 2, 2, 4 perusahaan lah. Walaupun misalnya nggak benar-benar amat ya ngibul lah sedikit, tapi ada lah kira-kiranya. Ini kan sama sekali nggak ada, itu loh, ini sudah berjalan, dipasarkan dong, *oke*. Ada investor masuk A, B, C inikan Weda Bay inikan jelas ini gitu loh. Ada yang sudah mau masuk, yang sudah siap menanamkan investasinya, ke siapa menangkan investasi itu kan muncul dari keyakinan FS-nya tadi, kok FS sudah jalan, izin sedang diurus, akhirnya *nggak* ada, jangan-jangan FS-nya abal-abal, iya dong.

DIRJEN KPAII KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (EKO S.A. CAHYANTO, S.H., LL.M.):

Mohon izin menjelaskan Pak, jadi ini permasalahan akhirnya tidak hanya terjadi di Ration Bangka Pak, tapi di beberapa kawasan industri yang lain juga ada keterbatasan terkait dengan kebutuhan untuk air bakunya Pak, karena memang sesuai dengan ketentuan pedoman pembangunan kawasan industri ini dilarang mereka untuk menggali, Pak. Jadi harus dari air permukaan, *nah* ini harus bekerja sama dengan apa, dengan selain izin dari balai sungai juga biasanya dengan PDAM setempat.

Nah ini mungkin detailnya silahkan disampaikan.

DIRUT PT RATION BANGKA ABADI:

Izin Pak, saya sampaikan terkait air baku itu memang bukan kewenangan kami pengelolaan kawasan. Memang dalam masterplan kami juga sudah disiapkan lokasi air bakunya, di sini nanti lokasi air bakunya.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Iya *nggak* Pak, sebenarnya saya *nggak* mau panjang soal kamu itu. Saya tidak mau panjang soal kalian itu, saya cuma bingung kenapa sekian lama berproses satu investor pun tidak ada yang masuk. Kalau mau bilang air, apapun dalam proses pembangunan kawasan industri tetap akan ada kekurangan yang bisa diselesaikan secara bertahap. Tapi setiap tahap itu ada dong ada langkah majunya.

Oke, sudah ada yang 3 mau masuk, 4 mau masuk, 5 mau masuk ini kan 0. Tadinya saya sudah mau berhenti di situ loh, tapi kalau dibuka lagi *nggak* apa-apa kita diskusikan *gitu*, ini menarik loh.

KETUA RAPAT:

Sebenarnya memberi sekedar ini apa yang disebut kekhawatiran dan itu menjadi catatan yang harus kita ingat, jangan sampai apa yang disebut dengan *land bank* biasanya dalam konteks ini tetapi itu adalah sebuah rekayasa.

Betul Pak Adian ya bahwa seolah-olah berencana bikin kawasan padahal hanya mau menguasai kawasan saja dan ini menjadi tradisi dalam konteks dunia ke depan itu memang ke arah sana, jadi apapun entah itu berupa hutan, berupa pantai, yang penting dikuasai dulu, yang penting seolah-olah ada rencana. Itu yang dikhawatirkan Pak Adian.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Dan ada uang negara di situ, 94 miliar paling tidak Pimpinan, *gitu* loh, tapi saya tidak ingin memperpanjang ini Pak Dirjen tadinya. Saya mau lanjut ke Weda Bay, saya mau lanjut kemana, Dirut PT Anugerah karena berarti yang disampaikan Dirut PT Anugerah ini angka apa dong, kalian kan belum, sudah sejauhmana, ini ada 6.000 tenaga kerja, apa segala macam itu baru angangan apa bagaimana, *nggak* biar satu-satu, Pak. Saya tadi ditanya sama Abang kita ini, inikan sudah ditulis nih penyerapan tenaga kerja 64.000, ini belum ada ya 64.000-nya, *nggak* apa-apa, yang penting kita tahu belum ada *gitu*. Jadi jangan kita berpikir negara sudah dibantukan 64.000 lapangan pekerjaan, ternyata tidak.

Nah untuk IMIP itu sudah berapa lama memproduksi stainless steel-nya.

DIR. OPERASIONAL PT IMIP:

5 tahun, Pak.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Sudah 5 tahun, hasilnya dijual ke mana?

DIR. OPERASIONAL PT IMIP:

Ada Taiwan, Australia dan sebagian ke Cina.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Yang di Indonesia, kenapa harus di ekspor ke luar?

DIR. OPERASIONAL PT IMIP:

Ada Pak, untuk dalam negeri tapi sedikit.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Kenapa keluar semua Pak, buat Pak Dirjen bukan buat Bapak. Bapak dari tadi saya dengar bicara, kami kementerian mendorong. Kata mendorong itu 4 kali diucapkan, ini di ekspor semua, sedikit yang buat Indonesia kenapa begitu? Sudah 5 tahun loh mereka produksi stainless steel.

DIRJEN ILMATE KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI:

Ya Pak, mohon izin untuk menyampaikan bahwa kebutuhan stainless steel itu memang speknya beda-beda Pak, jadi spek yang misal spek yang tebal-tebel ya Pak ya. Speknya beda, sehingga pasarnya juga beda, Pak.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Ya, saya tahu spek buat ini, buat ini segala macam dan kita tidak punya industri untuk mengurus spek itu.

DIRJEN ILMATE KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI:

Ada Pak.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Bahan baku industri kita untuk spek yang kita gunakan dari mana?

DIRJEN ILMATE KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI:

Ada yang dari dalam negeri dan dari luar negeri.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Oke, kenapa nggak dari dalam negeri, kenapa dari luar negeri kalau kita punya yang dalam negeri.

DIRJEN ILMATE KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI:

Itu memang system dagang Pak ya, sistem dagang mereka punya grup tapi yang lain, sebagian sudah kita mintakan untuk bisa didistribusikan ke Jawa sebetulnya, Pak.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Nggak begini loh Pak, mereka sudah produk stainless kenapa Kementerian Perindustrian tidak mendorong untuk membuat produk turunannya. *Nggak* saya mau tahu kebijakannya ada tidak?

DIRJEN ILMATE KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI:

Ada Pak, ada.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Kan begini Pak, penambangan hilirisasi industrialisasi begitu *nggak* kira-kira tahapnya?

DIRJEN ILMATE KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI:

Iya.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Oke, smelter itu bagian dari hilirisasi?

DIRJEN ILMATE KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI:

Iya.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Oke, industrialisasinya di mana? Sementara kalian ini Kementerian Perindustrian, bukan kementerian penghiliran.

DIRJEN ILMATE KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI:

Iya.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Produk industrinya mana?

DIRJEN ILMATE KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI:

Banyak produk-produk yang sudah dibikin Pak sebetulnya, konstruksi misalnya Pak.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Nggak ini yang saya tanya IMIP ini, iya dong. Jangan kemudian kalian bicara industri stainless steel, yang lain bahan bakunya dari Cina. Kita punya bahan baku sendiri, *nggak* kenapa IMIP ini tidak didorong untuk maju ke tahap industrialisasi, Pak Dirjen? Sudah 5 tahun mereka produksi stainless steel, kenapa kalian tidak dorong untuk industrialisasi.

DIRJEN ILMATE KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI:

Mohon izin Pak, kami menangani kawasan industri Pak, industrinya di direktorat.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Iya apapun itu, kalian *nggak* bisa bilang, yang saya tahu kalian satu kementerian.

DIRJEN ILMATE KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI:

Siap Pak, mohon izin menjelaskan.

Untuk proses hilirisasi dalam bentuk industrialisasi ini Pak, ini tidak hanya diperlukan, tidak hanya menyambungkan kami, dorongan kami tapi juga kami harus mencari investor dan industrinya. *Nah* ini yang kami kejar terus Pak, jadi sampai saat ini misalnya di sejak tahun lalu kami meminta di IMIP satu *tenant*-nya juga untuk bisa menyediakan bahan baku misal untuk Jindal gitu yang memproduksi eh apa namanya peralatan untuk rumah tangga.

Ini sebelumnya di IMIP itu belum diproduksi stainless steel untuk yang kebutuhan.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Nggak, nggak, bukan IMIP yang harus memproduksi, kalian harus mendorong mereka produksi.

DIRJEN ILMATE KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI:

Ini kami terus lakukan Pak, dalam *roadmap* yang disiapkan oleh.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Mana *roadmap*-nya, kapan kita mau industrialisasi di sana?

DIRJEN ILMATE KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI:

Sesuai dengan ... (suara tidak jelas 01.22.14) ... kami Pak, itu bertahap kami lakukan.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Iya ini sudah 5 tahun Pak, sudah 5 tahun mereka memproduksi stainless steel, kapan mereka mau kita tingkatkan di sana ada industrialisasi stainless steel. Tadi kita bicara di ruang pimpinan sebagian dibawa ke Jawa, kenapa *nggak* di sana? Ibu kota mau kita pindah Bang ke Kalimantan, terus kita tidak percaya begitu mereka bisa bangun industrialisasi di Sulawesi, sehingga harus diproduksi di Jawa. Sementara kita percaya ibu kota pindah ke Kalimantan, lalu apa peran kementerian untuk mendorong itu. Ada contohnya hasil stainless steel-nya?

Coba Pak Dirut?

KETUA RAPAT:

Ya misalnya sendok-garpu kek atau apa kek, ada industri yang merupakan turunan dari.

DIRJEN ILMATE KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI:

Ada, Pak.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Bisa diproduksi di sana?

DIRJEN ILMATE KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI:

Kita produksi bisa, kita ada bekerjasama.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Bisa diproduksi di sana?

DIRJEN ILMATE KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI:

Bisa Pak, ini kerjasama kita.

KETUA RAPAT:

... (suara tidak jelas 01.23.25) ... gitu loh, ini kan produk yang paling oke bahwa ini adalah salah satu hasil hilirisasi.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Industrialisasi.

KETUA RAPAT:

Industrialisasi, ini apa yang disampaikan bisa memperkuat apa yang disampaikan Pak Adian dengan argumen begini, sumber daya alam kita ini akan habis, bayangkan itu kalau itu nanti habis. Kita tidak pernah membuat industri, ini semuanya di ekspor dalam tingkat bahan apalah istilahnya Pak Adian tadi, bahan setengah jadi bahkan mentah.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Iya 70 tahun Pak Dirjen kita merdeka oke, sendok impor terus kalian bangga gitu menjadi pejabat pemerintah. Saya mau nanya tegas aja di antara 2 dirjen itu, berapa lama kalian bisa buat industrialisasi di Morowali, ayo dong mau undang UMKM kek, mau undang siapa kek, ayo dong mulai, ayo lah. Mau produksinya sendok, mau produksinya panci, ayo lah, mau 1 ton, mau 1 juta ton, tapi mulai lah, ayo. Biar kita tuliskan dalam kesimpulan bahwa dalam 1 tahun sudah ada industrialisasi di sana. Kan kalian memegang kebijakan bisa memberikan banyak kemudahan kepada siapa pun mau investasi di sana. Siapa Pak Dirjen yang bisa jawab ini?

DIRJEN ILMATE KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI:

Baik Pak, izin menyampaikan, sebetulnya kami sudah dorong mereka untuk bisa memenuhi bahan baku industri di Jawa terkait dengan kompor misalnya tadi kan bahan listrik, tapi nanti kami akan susun juga perencanaan itu Pak, hilirisasi di mana, di Morowali sebagai kelanjutan dari proses hilirisasi stainless steel tadi.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Saya tadi ngobrol sama Mbak Mercy dari Maluku, Halmahera itu daerahnya Mbak Mercy ya tetangga lah, oke, dia juga punya harapan yang sama. Kalau di sana sudah produksi nanti, bisa nggak industrinya juga di sana. Nah kapan ini kita minta kebijakannya industrinya dipindahkan ke Morowali.

KETUA RAPAT:

Pak Adian mohon maaf, tadi IMIP tadi sudah 5 tahun industrinya adalah industri IMIP sendok ini. Jadi menjadi catatan kita juga, betul yang di kita risaukan bersama.

Bapak-Ibu sekalian.

Nikel adalah salah satu komponen sangat-sangat penting di dunia ke depan, ujung dari segala ujung itu nanti adalah energi *storage* kita tahu itu. Di mana nikel komponennya terbesar, bayangkan kalau kita sampai zaman itu dan kita sudah tidak punya apa-apa dan kita tidak mulai apa-apa dari hari-hari ini sebagaimana disampaikan, hari ini sudah 5 tahun baru menghasilkan sendok. Ini ada capnya Pak Adian, saya kira ini sekedar *encourage* kita semuanya, kita-kita yang duduk di sini juga bukan pemerintah pelaku usaha. Ini harus segera kita ini merancang bangun yang lebih *sophisticated* bahkan, mohon maaf misalnya apapun bisa ditunda dalam rangka kepentingan yang lebih strategis ke depan, jangan semata-mata dari OR 1 koma sekian menjadi 12-14% menjadi katakanlah *sled* entah apa lah, langsung itu di ekspor. Harus perencanaan bersifat *integrated gitu loh*, bahwa ini kalau perlu sekarang IMIP bekerjasama dengan yang punya lithium, yang punya cobalt, pastikan produksi IMIP keluarannya adalah berupa produk entah itu baterai. Ini semua komponen teknologi semuanya ada nikel dan sebagainya.

Jadi bagi IMIP juga kepala perusahaan jangan main enak nya saja, memang enak sekali sekedar ini terus selesai, selesai, tidak. Bangsa ini memerlukan *competitiveness* dari sumber daya alam yang ada yang itu terbatas dan itu strategis.

Tambahan Pak Adian, mohon maaf.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Saya cuma minta satu aja Pak Pimpinan, negara bisa mendorong ini nggak? Berapa lama Pak, ada *nggak* industri di sana, jangan baterai dulu Pimpinan. Ini naman, apa, yang kecil-kecil aja dulu, yang nggak butuh teknologi rumit *lah*. Yang kemudian misalnya 5-6 rumah tangga UMKM bisa produksi *lah*, ada *nggak* peran negara untuk menolong itu, bisa *nggak* dalam satu tahun ini, *oke 2 tahun?*

Oke. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baiklah, tadi itulah dan juga interaktif saya kira jawaban, tanya jawabnya sudah bisa kita tangkap bersama. Esensi dari ini semuanya ini sumber daya alam yang terbatas, harus kita kelola secara betul-betul secara bijak, tidak sekedar menghasilkan nilai ekonomi hari ini tetapi juga dalam perspektif yang lebih luas menyangkut banyak hal.

Terima kasih Pak Adian.

Dilanjutkan masih ada, cukup ya? *Kok* matanya merah kenapa Pak Ardian, atau marah? Dilanjutkan ada Golkar, dipersilakan.



F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan, kemudian juga Rekan-rekan Komisi VII serta Bapak-Ibu sekalian, Pak Dirjen KPAIL dan jajarannya, kemudian juga yang mewakili Dirjen ILMATE, kemudian para perusahaan-perusahaan pengembang kawasan industri ya.

Baik Bapak-Ibu sekalian, ya kita pada sore hari ini mengundang Bapak-Ibu sekalian untuk hadir pada sore hari ini kan kami ingin tahu sebetulnya bagaimana sih proses yang sedang berjalan tentang bukan hanya hilirisasi tetapi industrialisasi. Saya pikir terminologi yang paling cepat, yang paling tepat diksinya sekarang ini adalah bukan lagi hilirisasi ya tetapi merupakan industrialisasi. Bagaimana seperti disampaikan berulang kali oleh Bang Adian tadi, ya ini adalah suatu ekosistem.

Sebetulnya Bapak-Ibu sekalian, misalkan dengan adanya Dirjen KPAIL ini sebetulnya inikan merupakan 1 upaya bagaimana kita mengembangkan kawasan-kawasan industri iya kan, yang akan menjadi titik-titik baru pengembangan kawasan industri yang tersebar di wilayah-wilayah di luar pulau-pulau Jawa tersebut.

Begini, saya selalu mengawalinya dengan prolog seperti ini bahwa Komisi VII selalu mengawal program pemerintah dalam fungsi pengawasan sebagai kemitraannya, ini dalam bagaimana menjalankan transformasi ekonomi tersebut, ya. Kita ingin bagaimana kita, ekonomi kita bukan hanya sekedar komoditas menjadi berbasis kepada pengolahan. Dan tentunya ketika menjadi industri pengolahan, kawasan industri ini menjadi penting ya kan seperti itu. Saya pada beberapa kesempatan yang lalu itu saya sering jalan dengan Agung Laksono, beliau cerita, beliau kan Watimpres ya. Beliau cerita beberapa kali sering ke Cina diundang ke kawasan-kawasan industri, di sana Bang, katanya kayak kampung itu. Satu kampung itu isinya bahan mentahnya cuma satu, ketika masuk ke satu pabrik besarnya lalu akan menjadi barang-barang. Lalu limbah dari pabrik tersebut akan ditampung oleh pabrik berikutnya, lalu limbah dari pabrik yang kedua di tampung lagi ya. Jadi betul-betul *nggak* ada sisa lagi, betul-betul efisien.

Nah saya pikir mungkin ke sana yang akan kita dorong, kita ini kan tadi itu sebetulnya yang kita ingin dorong itu adalah bagaimana kita menimbulkan satu ekosistem, *supply change* sebetulnya iya kan, industri pengembangan satu produk. Jika misalkan *raw materia*-lnya adalah nikel, lalu produk turunannya dengan pohon produknya itu, itu semua bisa dapat kita kembangkan. Tetapi mungkin ada satu hal yang saya pikir Kementerian Perindustrian juga mesti paham, salah satu hal yang menghambat investasi

pengembangan industri lanjutan itu adalah persoalan regulasi sendiri, Saya sampaikan regulasi fiskal, ini bisa dicek, ini interaktif Pak ya.

Bapak kalau yang dari IMIP ya, produksinya kan stainless steel ya, Bapak jual juga ke dalam negeri?

DIR. OPERASIONAL PT IMIP:

Ada Pak, tapi sedikit sekali.

F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Oke, ketika Bapak jual ke dalam negeri, Bapak keluar PPN *kan*. Oke, ketika Bapak ekspor, Bapak keluar PPN *nggak*? Sudah pasti tidak.

Nah ini Pimpinan, yang saya sampaikan.

DIR. OPERASIONAL PT IMIP:

Nggak ada, Pak.

F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Nggak ada, selisih pun untuk barang dalam negeri kita punya barang sendiri, sudah selisihnya 11%. Hari ini, ini adalah ekonomi global, hari ini kawasan ASEAN adalah Masyarakat Ekonomi Asian no tarif, ya bagaimana, yang kasihan ini sebetulnya Kementerian Perindustrian, kita kasih target kepada mereka, tetapi regulasi fiskalnya *nggak* mendukung. Saya sudah berulang kali menyampaikan kepada Pak Menteri ya, Pak AGK, Pak Menteri kalau begini bisa mati berdiri Bapak karena kenapa? Dituduh tidak mengakselerasikan apa namanya tumbuhnya industrisasi. Ya sebenarnya ego sektoral, Kementerian Keuangannya main pungut-pungut aja dia, *kan nggak* bisa begitu. Masalah ini adalah masalah yang paling mendasar, jika selisih harga didalam negeri pun sudah 11% bagaimana orang mau investasi, *kan* begitu.

Nah ini Pak yang menjadi persoalan paling mendasar, selama ini belum di atasi ini akan menjadi masalah terus. Kita hanya beretorika saja, sementara apa namanya bagian dari pada pemerintahan sisi yang lainnya justru tidak mendukung karena kenapa? Ego sektoral tadi, PPN itu adalah sangat tidak masuk akal jika dibebankan kepada barang-barang intermediet, barang-barang untuk pengolahan lanjutan, *nggak* boleh, PPN itu harus dipungut di ujung, harus dipungut di ujung.

Sehingga dengan demikian barang-barang kita memiliki daya kompetitif, betul Pak ya, selisih pun sudah 11%. Ini hitung-hitungan yang paling sederhana, nah inilah bang Adian ya, ini persoalan investasi ini menjadi masalah jika regulasi fiskal kita tidak bisa kita atasi. Jadi belum lagi kemarin misalnya saya mendengar mau ada cukai plastik, inikan gila, plastik pun mau

dicukai lagi, tapi untung katanya batal itu, setelah kita bersuara ya Komisi VII di 2 masa persidangan kemarin.

Masalahnya begini, masalah lingkungan itu adalah bagaimana kita menangani sejak sampah itu diproduksi, masalahnya kita ini Pak Pimpinan. Sampah-sampah di Indonesia ini tong sampahnya ada 4 warna ya, betul ya, tetapi begitu dibawa ke mobil angkot sampah satu tempat saja. Kalau gitu kenapa harus ada 4 kotak? Karena sampah pun diproduksi sejak awal sudah salah dan semuanya hanya merupakan apa namanya asal seolah-olah sudah melaksanakan pemisahan dan sebagainya.

Nah Bapak-Ibu sekalian.

Kami ingin bagaimana Komisi VII ini ingin mendorong munculnya industri ya, munculnya industri yang memang merupakan pengembangan daripada barang-barang yang menjadi andalan kita. Ini kan yang hadir di sini rata-rata pengolahan nikel iya kan, nikel ini dengan kadar 1,5% ke atas itu sekitar 2,75 miliar ton, itu kira-kira 10 tahun habis. Kemarin Dirjen ILMATE melaporkan 34 smelter beroperasi iya kan, 17 dalam proses apa namanya pendirian, 7 lagi FS. Ini kalau semuanya berjalan iya kan, sementara yang diproduksi oleh apa para smelter-smelter hanya baru MPI, kita akan kehilangan momentum. Jadi memang kalau pertanyaan Bang Adian tadi itu berapa lama memang desakannya ke sana, kita tidak mau kehilangan momentum.

Nah jadi saya pikir ini perlu satu pemahaman yang sama di antara kita, kami di legislatif kemudian kementerian, juga rekan-rekan pengusaha ini juga harus memahami, kami ini tidak mau kehilangan momentum, iya kan. Jangan sampai kemudian berjalan, berjalan, berjalan tiba-tiba sumber dayanya sudah habis, sementara belum melakukan hilirisasi atau industrialisasi yang memang kita hendaki, sementara kita sendiri di dalam ini Pimpinan, kalau *nggak* kita hanya, gini loh penyampaian-penyampaian yang saya sampaikan ini sebetulnya bukan hal yang baru. Saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan ini pada beberapa kesempatan Pimpinan ya, tetapi ya hanya akan melupakan satu apa kayak orang curhat aja. Nah kami pikir kita Komisi VII perlu bersikap mengeluarkan beberapa hal rekomendasi-rekomendasi yang harusnya diperhatikan oleh kementerian, terutama Kementerian Keuangan, seperti itu. Ya misalkan saya tertarik tadi itu *anu* ya dengan IWIP ya, tadi waktu Bang Adian nanya-nanya ini dijawabnya begini, di kawasan Bapak, Bapak kan tidak punya smelter ya?

DIRUT PT IWIP:

IWIP sebagai pengelola, Pak.

F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Pengelola kan, tidak punya smelter.

DIRUT PT IWIP:

Tidak.

F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Iya tapi saya dengar tadi bapak beli OR-nya banyak, jadi posisinya Bapak sebagai apa, sebagai *trader*?

DIRUT PT IWIP:

Jadi, bukan Pak, jadi IWIP hanya pengelola kawasan kemudian masing-masing *tenant*, mereka membeli, membutuhkan OR. *Nah* di kawasan itu ada area timbun OR, area timbun batubara itu yang kami sediakan.

KETUA RAPAT:

Sebentar yang terhormat, mohon interaktif dulu ya saya ke toilet *nggak* bisa diwakilkan ini soalnya, mohon ampun, mohon ampun, ya dilanjutkan terus, sebentar, paling 3 menit saja.

F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Nah jadi Bapak memposisikan itu sebagai menyediakan tempat stok *case* atau Bapak sebagai *trader*, atau gimana ceritanya.

DIRUT PT IWIP:

Tidak Pak, tidak, tidak *trader*, kita bukan *trader*, kita bukan yang membeli OR, Pak. Jadi kita hanya kawasan industri saja.

F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Kawasan saja, oh begitu *oke*.

Iya baik, kepada para dirjen ya mengenai apa namanya, salah satu hal yang menjadi hambatan investasi kita nih Pak, ini tolong disampaikan agar nanti Pak Menteri juga *fight* pada rapat terbatas, bahwa mengenai masalah PPN ini betul-betul menghambat investasi, karena kenapa? Orang hitung-hitungannya *nggak* akan masuk, orang kalau begitu Pak lebih baik mendirikan pabrik skala besarnya di luar negeri Pak, karena selisihnya pun sudah 11%. Artinya kalau selisihnya 11% tahun ke-9 pun juga sudah balik modal selisihnya itu, iya *kan*. Ini menurut saya menjadi hal yang sangat penting.

Lalu kemudian, tentu kami juga mendukung bagaimana kawasan-kawasan yang sudah beroperasi ini agar juga, kan Bapak ini *kan b to b* pendekatannya *b to b*. Lalu kalau Dirjen KPAII ini kan memfasilitasi secara regulasi, Pak ya. Iya artinya secara *b to b* Pak, dengan harapan yang kami sampaikan ini Pak, Bapak juga bisa mengundang investasi-investasi baru di dalam bagaimana melakukan hilirisasi tersebut, iya *kan* sesuai dengan produk

yang dikembangkan pada kawasan Bapak, sehingga ini betul-betul secara ekonominya Pak betul-betul memberikan nilai tambah dan juga memberikan *multiplier effect* ekonomi yang seluas-luasnya seperti itu, karena kalau nggak semuanya Pak, tiba-tiba momentumnya sudah lewat.

Nah sementara Bapak mungkin kalau secara *doing* bisnisnya menangani beberapa tenant sudah cukup, tetapi Bapak harus mengembangkan kawasan itu yang untuk UMKM-nya Pak, iya *kan*. Kita ini kan berharap dari situ nanti akan berkembang UMKM yang naik kelas nantinya *kan* begitu, jadi bukan hanya investasi-investasi besar saja yang akan berkembang nantinya.

Nah nanti yang disampaikan Bang Adian tadi misalkan sendok lah, nanti kompor lah, apakah semuanya bisa berdiri Pak, dan itu di fasilitas Bapak. Jadi ini kita semuanya apa, bersama-sama sinergi.

Nah lalu kemudian kepada Pak Dirjen KPAII, tadi Bapak menyampaikan paparan tadi. Ini didapati beberapa daerah-daerah ini punya perda-perda Pak ya, untuk kawasan industri begitu ya.

DIRJEN KPAII KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (EKO S.A. CAHYANTO, S.H., LL.M.):

Untuk kawasan peruntukan industrinya, Pak.

F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Kawasan peruntukan, pernah dibuat satuan *nggak* Pak ya kira-kira, tadi kan Bapak menyampaikan beberapa perda itu, itu ternyata tidak teknis dan tidak konkrit karena mereka lebih melupakan kepada produk politik, Pak. Produk politik dari kepala daerah agar bahwa mereka sudah melakukan sesuatu. *Nah* ini kira-kira bagaimana upaya daripada kementerian di dalam Perda-perda seperti ini, seperti itu. *Nah* itu nanti dijawab tertulis aja Pak iya, karena bagi saya ini cukup penting, karena kita ingin bagaimana muncul, muncul kawasan-kawasan industri yang pemdanya dukung tetapi juga memang apa namanya bukan hanya sekedar produk politik saja.

Lalu ini dari ke PT Ration Bangka Abadi, ini rupanya kawan-kawan kita juga nih, ya *kan* karena saya tadinya *nggak* tahu siapa rupanya Pak Yanto, ini Pak Yanto Purba panggilannya. Purbanya itu pura-pura batak itu canda kita, jadi bukan orang batak dia. Ya mungkin begini Pak, selain kendala masalah air, masalah apa ya, saya jadi *nggak* tega banyak bertanya Pak karena tadi Bang Adian sudah cukup julid. Yang paling penting begini harapan kami adanya kawasan industri di Sadai ini, ini betul-betul dapat apa namanya disesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan, yaitu misalkan pengembangan untuk silika, kemudian juga timah karena dari Bangka Selatan ini salah satu yang menjadi mineral-mineral keunggulannya ya seperti itu ya. Tetapi tentu ini banyak yang menjadi PR dan saya pikir ini yang menjadi hambatan Pak Dirjen, ini bukan hanya nanti di yang sekarang ini, di daerah-daerah lain juga banyak.

Nah kita ingin bahwa kawasan-kawasan industri yang ada di daerah yang sudah di-perda-kan itu bukan hanya merupakan produk politik. Sehingga dengan demikian ini dalam 10 tahun ini, kita betul-betul dapat mengakselerasikan pertumbuhan industri, semua daerah tumbuh iya kan baik itu yang diinisiasi oleh pemerintah daerah, baik yang dilakukan oleh investor-investor lainnya, saya pikir demikian ya atas penyampaianya.

Tujuh kali tujuh sama dengan empat Sembilan,
Setuju nggak setuju yang penting sudah saya sampaikan.
Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Bambang Pati, Beliau dari Bangka Belitung jadi detail betul. Pak Pur, apa tadi? Pura-pura, Bandung.

Ya, jadi apa yang dikhawatirkan di catatan Bapak-Ibu sekalian, kita tahu ada sebuah modus ya bahwa sekarang itu bagaimana menguasai sebuah wilayah, apalagi kenapa saya pertanyakan, apalagi di *support* dengan namanya *policy* proyek strategis nasional, bisa kita bayangkan, segala sesuatunya dipermudah tetapi sebagaimana dikhawatirkan Pak Adian tadi *visibilities study*-nya kalau begitu berantakan dong kalau dan seterusnya. Ini itulah ini menjadi ingatan kita, kita semuanya demi negara-bangsa, demi tanah air yang untuk masa depan kita bersama.

Selanjutnya dari Fraksi Gerindra, waduh ini kalau Pak Ramson saya pastikan jauh-jauh lebih tajam lagi dari Pak Adian.

Dipersilakan yang terhormat.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Pak Ketua dan Rekan-rekan Anggota yang terhormat,
Pak Dirjen dan semua Pimpinan perusahaan-perusahaan kawasan industri dan juga penambang nikel.

Ya jelas Pak Adian lebih tajam dong sangat mendalami nikel, jangan-jangan sudah punya area tambang kali ya, 3 jadi mendalami betul. Hanya memang sesudah data-data Pak Dirjen yang berkembang ini, kita tambang



nikel kita, cadangan nikel kita mungkin sekitar 13 ke 15 tahun lagi. Tapi ini semua yang di ekspor ini masih *raw material*, walaupun di smelter diolah paling yang seperempat jadi, belum setengah jadi di ekspor juga. Memang ini soal strategi global ekonomi sebenarnya, China dalam hal saya pernah mempelajari 15 tahun lalu *how China growth*. Jadi sekarang-sekarang ini era 7 tahun belakangan ini mereka akan mendorong ke *foreign investment* untuk mendorong perputaran ekonomi tetap di negaranya. Jadi pengolahan itu industrialisasi itu tetap bergerak di Cina, tapi bahan baku diambil dari sini. Makanya kalau Pak Jokowi mengkhawatirkan akan Cina mengajukan tuntutan di WTO mengenai larangan ekspor bauksit ya itu ada benarnya.

Jadi sebenarnya WTO itu *World Trade Organization* itu yang menguntungkan Cina karena mereka mampu kompetisi. Saya juga tahun 2009 pernah diskusi dengan ASEAN plus Cina, plus negara-negara miskin di Singapura soal itu WTO, termasuk dari sekretariat jenderal dari Geneva. Saya sampaikan begitu memang saya diprotes oleh ada profesornya yang dari Geneva juga, saya bilang mereka yang lebih siap. Sebelah saya kebetulan waktu itu delegasi dari Cina, anggota parlemen sama staf ahlinya doktor-doktor waktu itu.

Jadi ini mereka dimainkan sekarang cuman kemampuan negara kita untuk negosiasi lemah, ini akan sebentar aja ini dimainkan ini. Jadi di sana kan menurun pertumbuhan ekonomi, mendorong ini di sini, ini dimainkan karena di sana juga udah meningkat apa namanya konsumsi apa namanya standar hidup rakyatnya udah meningkat. Kalau kemarin waktu 30 tahun yang lalu mereka masih apapun masih mau gaji kecil, sekarang gajinya udah gede. Kita dimainkan sebenarnya ini, nanti habis nikel kita, tiap tahun dan kita belum masuk ke industrialisasi, mereka terus berkembang.

Ini sebenarnya terus terang aja, saya *nggak* mau buka aja kelemahan-kelemahan kebijakan negara, karena saya juga partai koalisi, semua harus saya angkat-angkat saja, saya puji-puji aja.

KETUA RAPAT:

Saya juga koalisi loh Pak, Nasdem koalisi.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Maksud saya ya gitu, sebenarnya kalau ini kemampuan kompetitif bangsa kita ini masih belum handal, Pak. Ini nanti ini diambilin ke sana nih, tapi saya juga *nggak* bisa menyalahkan mereka, memang itulah strateginya, memang itu arahnya. Jadi ini soal rasional ekonomi strategic aja ini, soal itu aja. Jadi ini pelaku-pelaku aja yang diuntungkan, tapi *masterplan*-nya mereka jago. Kita ini bakal begitu saja hasilnya, jadi nanti 13 tahun lagi habis ini, kita belum tidak optimal nanti *finish goods* dari *raw material* nikel ini, padahal 13-15 tahun lagi habis. Jadi kita tetap sulit bangsa ini, rakyat ini, *nah* ini problem juga tapi *finish goods* di ekspor ke sini. Kita lebih apa salah satu apa namanya importir kita itu impor bahan, barang jadi itu terbesar itu dari Cina import, coba cek data statistiknya. Saya tanpa saya cek bisa, sebenar saya bisa cek aja cuma saya



nggak seperti dulu lagi punya keinginan untuk mengecek data-data itu, tapi jelas secara intuitif saya bisa tahu terbesar dari Cina. Itu barang jadinya yang diolah di sana karena kita market terbesar, salah satu terbesar market-nya.

Ini sebenarnya makanya ya saya kalau di Komisi XI itu sama Sri Mulyani saya debat terus itu, iya 2004-2009 saya di situ sama di Badan Anggaran. Artinya dari awal sudah harus di-*setting* ini mengenai strategi pembangunan ekonomi bangsa ini, tapi ya ini semua ini semua gampangnya *nggak* bisa dirubah lagi nih 1 tahun ini sudah makin mengakar semua, sampai habis nanti nikel ini terus berulang-ulang. Kita di sini membuat Undang-Undang Minerba tahun 2009 kita ketok, saya pas di Komisi VII waktu itu, sebelumnya pindah di XI tapi saya masih di pansusnya, itu supaya dalam tempo 5 tahun tidak boleh lagi ekspor *raw material* 2014, tapi *nggak* bisa karena pemerintah pro aktif saat itu, *nggak* membuat strateginya. Artinya ini aspirasi yang mengatur rakyat ini *nggak* bisa direalisasikan, tiba-tiba tahun 2012 dilarang ekspor.

Akhirnya kan modalnya orang-orang ini jadi *nggak* ada, padahal sebenarnya 5 tahun ini dengan ekspor terus dia bisa modalnya besar, dia membangun industri smelter, terus berkembang ke industrialisasi tapi menterinya tidak berpikir seperti itu, saya tahu siapa menterinya, saya tahu kualitasnya, tapi saya mau bilang apa lagi kan ini semua kita ini di Indonesia ini lobi-lobi yang bagus, jadi taktis-taktis, lobi sana, lobi sini tapi tidak berpikir strategis jangka jauh. Saya dulu sama bekas bos saya juga berbeda soal-soal itu, makanya saya pindah saya. Beda saya, saya berpikir strategis jangka jauh saat itu, tapi sekarang saya *nggak* bisa lagi, asal jadi anggota aja terpilih lagi nanti supaya bisa berkawan sama dia, sama Pak Ketua, sama Pak Bambang, iya jadi begitu aja. Terus terang aja, saya kadang-kadang stress ini juga kepala saya karena saya tahu persoalan-persoalan mendasarnya, nanti gini-gini lagi akhirnya lihat aja.

Terus terang aja karena hebatnya Pak Jokowi karena merakyat aja nih, merakyat aja, tapi kemampuan kompetitif bangsa ini belum. Ini *kan* hanya pelaku aja ini dalam satu system yang diatur oleh *masterplan* dari sana karena ini tahapan fase mulai 10 ahun yang lalu China itu *foreign investment*, jadi mereka bertahap itu, sampai waktu kapan mereka industrialisasi, sebelum industrialisasi mereka pertanian dikuasai, nusantara itu masuk mereka ke *free market* karena udah kompetitif industri sama pertaniannya udah siap baru masuk ke *free market*, bersaing mereka, baru masuk mereka ke WTO, memang mereka kan waktu itu di barang-barang ringan-ringan mereka menguasai di Amerika, Eropa, habis itu naik kelas mereka *nggak* mau lagi itu barang-barang kemeja-kemeja itu, itu udah urusannya Pakistan sama Bangladesh, Cina meningkat lagi makanya ini dikuasai. Kita hanya di ini aja, jadi tidak bisa kalau saya tidak bisa menyalah-nyalahkan itu soal adu ini aja adu otak, kita diangkat-angkat udah senang, *nah* itu. Jadi ini susah dimarah-marahin juga tidak bisa ini, udah berat nanti 13 tahun lagi habis nikel.

Saya terus terang aja Pak Ketua, kadang-kadang saya ini juga terus tenang aja, artinya saya kadang-kadang diri saya itu beda dengan diri saya yang sebenarnya. Iya betul karena ini saya udah tahu dari awal, paling ini hasilnya akan begini, ini hasilnya akan begini. Ya kalau, kalau akhirnya ya saya bon lah, gaya bon lah kan jadi semuanya hilang gitu *kan* ya pergi ke Kroasia,

santai lah apa ya udah gitu jadinya iya *nggak* Bu Mercy, iya kan? Iya, karena saya tahu, Pak.

Saya udah ulas *how China growth*, bagaimana tahapannya? 5 tahapan, 5 tahapan. Jadi ini dimainkannya ibarat suatu percaturan itu, jadi kita diangkat-angkat sedikit udah, udah senang, pejabat pun diangkat sedikit, udah, apalagi sekarang seperti kami ya diperhatikan mitra ke dapil udah senang *kan*, loh iya *kan*. Ya ini fakta jadinya, jadi saya *nggak* berfikir lagi yang strategis yang nasional dan global, teknis aja di dapil, acara-acara. Ini kalau apa namanya tadi ini *industrial park* apa tadi, IMIP, kalau dukung acara saya di dapil pasti saya *back back up* Bapak-bapak, bikin acara di dapil ya, dapil saya ya, kasih ini ke TA, bukan untuk saya untuk rakyat saya, bikin penjelasan lah soal tambang.

Ya udah begitu CSR atur kan ada mekanismenya karena saya bisa bingkarin satu-satu sebenarnya persoalan-persoalan bangsa ini, tapi saya udah *nggak* gitu lagi karena udah begitu supaya ya di dapil saya yang 3-4 kabupaten ini *lah* bikin acara, terpilih lagi ya *gitu* karena ini udah susah nih merombaknya nih. Jadi *gitu-gitu* aja, bisa *nggak* bikin acara CSR di dapil, di rakyat? Bisa dong saya tahu berapa untungnya, makanya saya cek tadi 6 miliar US dolar, Bapak saya tahu itu Pak, saya tahu hitung-hitungannya tekniknya tahu, *accounting*-nya juga saya tahu bisa, strategisnya saya tahu, makronya bisa saya cek. Saya tahu, tapi saya ngapain lagi saya bongkar-bongkar karena saya tahu sudah kuat juga, ini Bapak-bapak ini udah kuat juga lobi, tapi daripada gue bongkar-bongkar nanti ya udah bikin acara di dapil saya aja, bisa *nggak*? Tanya dulu dirutnya. Bisa *nggak*? Tanya dulu dirutnya. Bisa *nggak* interaktif dulu, Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang-Pekalongan, iya *oke* ya.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mohon maaf ya bahwa apa yang dimaksud oleh Pak Ramson bukan bentuk pesimisme, tapi bagaimana fakta itu selalu berulang dikarenakan memang *policy* dasar kita ya memang tadi. Ini sebagaimana kita tekankan berkali-kali, semuanya Pak Adian juga menyampaikan, tinggal sekian fakta kan habis ini nikel *gitu loh*, kita ini *nggak* jadi apa-apa *gitu loh*. *Nah* itu yang jadi apa, sedangkan nikel adalah kita bersyukur, dunia sekian cadangannya, Indonesia itu terbesar selain ada Rusia, ada yang lain-lain, tapi Indonesia terbesar. Ini kan sebuah karunia yang harus kita juga kelola secara baik.

Saya kira itu dilanjutkan dari Nasdem Pak Rico, *nah* beliau Pak Rico ini dari Papua Barat.

Dipersilakan Pak Rico.

F-P. NASDEM (RICO SIA):

Baik, terima kasih Pimpinan.



*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Salam sejahtera untuk kita semuanya.*

Terima kasih untuk paparan yang sudah diberikan disampaikan oleh Pak Dirjen berdua, juga kepada rekan-rekan industri. Saya pikir semua sudah panjang lebar tadi disampaikan oleh Rekan kita Pak Adian, Pak Bambang dan Bung Ramson Siagian yang ganteng ini. Saya tertarik dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bambang soal pajak yang tidak ada di dalam negeri, tapi kemudian lebih enak *dong* PPN, berarti lebih enak jualan di luar.

Saya tertarik dengan masalah alur uangnya justru, izin interaktif sedikit Pimpinan, mungkin sama Pak Dirjen Perindustrian atau mungkin langsung, salah satunya *lah* mungkin bisa menjawab. Kalau hasil transaksi, kalau hasil pemurnian ini kan setengah jadi kan dilakukan di dalam negeri ya artinya smelter-smelter, teman-teman yang sudah memproduksi kemudian mengirim atau ekspor keluar yang setengah jadi. Pertanyaannya adalah transaksi uangnya apakah di dalam negeri apa di luar negeri, yang ingin saya tanyakan terkait dengan perputaran uang tadi, terkait dengan pajak tapi ini lebih sedikit lebih detail. Apakah misalnya dari perusahaan salah satunya kita sebut siapa, Si A, A ini bertransaksi di luar negeri atas penjualan barangnya atau bertransaksi uangnya dikirim ke dalam negeri di sini. Sehingga perputaran uang itu ada di Indonesia atau berputarnya uangnya, transaksinya, semuanya ada di luar di negara di mana mereka produk yang setengah jadi tadi dibikin jadi.

Mungkin saya izin interaktif dengan salah satu siapa yang bisa menjawab ini, izin ya Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya ini gambarannya begini, ini ada fenomena yang luar biasa kita kan tahu bahwa namanya nikel adalah salah satunya di sini ya, salah satu produk dari kita yang ekspor, tetapi lantas di mana uangnya? Karena da indikasi mungkin nanti akan kita cek mungkin di Departemen Keuangan atau Kementerian Perdagangan. Yang besar ini komoditas yang besar ini tidak secara signifikan menambahi cadangan devisa kita, *nah* itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan, di mana sebenarnya transaksinya. Apakah itu lantas sebagai masuk sebagai devisa atau apa? *Nah* ini betul ya Pak Rico ya, siap, saya hanya menjelaskan ada fenomena-fenomena itu memang. Coba nanti kalau tidak bisa menjelaskan secara tuntas, nanti coba *flow*-nya siapa ini, ILMATE atau KPAll atau apa tampaknya, bahwa ekspor itu lantas dilakukan industrinya memang di sini, barangnya dari sini, lantas di ekspor. Bagaimana sistem mekanismenya keuangannya, mungkin Dirjen ILMATE tahu *nggak*? Kalau memang tidak tahu, sebut aja *nggak* tahu gitu ya. Jadi supaya tidak, Pak KPAll ini kayak koalisi perempuan dan anak ya, saya, bukan karena memang ada, saya agak trauma ini, biar ketawa.

DIRJEN KPAILI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (EKO S.A. CAHYANTO, S.H., LL.M.):

Karena I-nya dua jadi istri-istri Pak belakangnya, Pak.

Mohon izin sedikit saja Pak Rico menyampaikan bahwa terkait dengan ekspor dari proses pengolahan sumber daya alam yang dilakukan, ini ada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan dan/atau pengelolaan sumber daya alam ya termasuk tambang. Kebetulan kami tidak menangani langsung tetapi beberapa kali, bahkan Pak Menteri Perindustrian menyampaikan usulan terkait dengan pemanfaatan DHE ini. Jadi seperti yang dilakukan oleh beberapa negara lain kami ada *benchmark*-nya, meskipun tidak lama devisa hasil ekspor ini ditahan sebentar dan dimanfaatkan untuk industri dalam negeri Pak, untuk investasi industry dalam negeri.

Ini yang kami dorong sebenarnya terkait dengan proses industrialisasi di barang tambang ini, ya sumber daya alam ini, ini bisa dilakukan. Namun karena otoritasnya bukan di kami Pak, kami hanya bisa menyampaikan usulan saja.

Demikian, terima kasih.

F-P. NASDEM (RICO SIA):

Izin Pimpinan, apabila dari Pak Dirjen KPAILI tadi belum bisa mungkin saya ingin bertanya langsung ke perusahaan, mungkin. Mungkin salah satu perusahaan bisa menjawab yang sudah melakukan ekspor, misalnya apabila ada pembelian dari luar negeri, apakah transaksi itu menggunakan uangnya langsung di luar negeri, pembayaran di luar negeri. Sehingga tidak ada pembelian yang uangnya masuk ke dalam negeri, yang menghasilkan devisa untuk Indonesia. Memang pengolahan di sini, bayar gaji di sini, bayar pajak di sini, semua di sini, tapi apakah ada uang yang beredar di Indonesia terkait dengan hasilnya atau semua transaksi penjualan adanya di luar negeri. Sehingga uang transaksi itu adanya di luar negeri sana, Indonesia hanya untuk sebagai pembayar pajak, sebagai bayar gaji-gaji, tidak ada uang yang beredar di sini, mungkin begitu. Ada yang bisa jawab mungkin transaksinya apakah di luar negeri apa di dalam negeri.

KETUA RAPAT:

Ya contoh jadi begini Pak, saya menambahkan Pak Rico bahwa tadi transaksinya, jangan-jangan transaksi itu dilakukan di luar negeri dengan mata uang setempat, tersebut termasuk bayar gaji yang dari negara itu, jangan-jangan bukan hanya kartu kredit saja bisa digosok di sini tapi proses transaksinya di sana, termasuk pungutan dalam konteks pajak dan sebagainya. Ini sebuah, kenapa demikian? Karena perputaran ekonomi itu berasal dari namanya *raw material* berupa OR tadi dan alangkah naifnya kita kalau semuanya itu lantas tidak apa yang disebut dengan **...(suara tidak jelas 02.05.40)... trickle down effect**-nya itu tidak terasa, ini kan juga tidak boleh gitu

pasti itu, pasti nanti akan marah betul kayak orang-orang yang tipenya Pak Adian ini.

Coba jelaskan *flow* ininya, *flow* apa, sampaikan.

DIRUT PT IWIP:

Izin Bapak, mungkin ini hanya *sharing* aja Pak ya artinya saya bukan ahlinya. Setahu saya bahwa semua transaksi, seandainya kita mengeksport itu diawasi oleh BI dan Ditjen Pajak, karena memang ada aturan bahwa pembayaran hasil ekspor itu harus dibayarkan bank yang ada di Indonesia. Artinya bisa aja bank nasional atau bank private swasta begitu Pak, tapi harus dibayarkan ke bank tersebut. Tidak bisa misalkan kami berjualan ke depannya mungkin seperti Bapak tadi bilang ada di luar negeri, saya rasa tidak bisa. Kalau sampai itu terjadi juga akan teridentifikasi oleh Bank Indonesia dan dari pajaknya Pak, karena kan ada rekonsiliasi kan di pajaknya *kan*, ada uang masuk, ada uang keluar.

Selain itu untuk memproduksi MPI atau feronikel ini, menurut perhitungan kami 80% itu adalah *cost of raw material*. Artinya nikel OR tadi, kemudian batubaranya, kemudian apa namanya logistik dan biaya manusia. Kalau uang itu ada di tempat lain ya bagaimana bisa kami membiayai 80% dari *cost* tadi, Pak.

KETUA RAPAT:

Baiklah, cukup saya kira Pak Rico ya bahwa nanti kita akan melacak terus menerus pasti, jadi kita nanti akan membandingkan apa bahwa ini misalnya ekspor komoditas ini sekian besar. Apakah signifikan *kan* kelihatan kita dibaca di lalu lintas keuangan yang bisa di neraca perdagangan dan sebagainya yang itu implikasinya kalau mau menjadi masuk di kas negara, itu akan masuk dalam tercatat menjadi cadangan devisa dan sebagainya, saya kira itu.

Terima kasih ini sebuah, Pak Sartono selanjutnya dari Fraksi Demokrat.

F-PD (SARTONO, S.E., M.M.):

Terima kasih Pimpinan, ini lompat, PKB *nggak* ada ya, sholat lagi sholat.

Maaf Pimpinan agak lambat tadi, kami ingin menyampaikan ke para Bapak semuanya. Pertama kami ucapkan terima kasih Pak Pimpinan yang kami hormati, sahabat Komisi VII yang kami hormati dan Pak Dirjen, ada Dirjen KPAIL sama ILMATE, *nggak* hadir ya Pak ILMATE, terima kasih.

Kami ingin bertanya begitu kepada operator pelaksana kawasan industri, bagaimana tata kelola terhadap lingkungan bagi masing-masing lokasi yang Bapak sekalian kelola selama ini. Apakah sudah dipersiapkan dengan baik, dengan matang begitu, sehingga jangan sampai nanti ya ke depannya Indonesia ini mendapatkan predikat negara yang pengelolaan lingkungannya



kurang baik di mata internasional. Ini biasanya program perencanaannya bagus, tetapi di dalam implementasinya itu suka tidak *linier* begitu apa yang sudah menjadi rencana program dalam tata lingkungan. Kalau kadang-kadang kita kemarin juga kunjungan ke suatu daerah begitu kawasan, *wah* itu realitas di lapangan agak tidak begitu tertib begitu. Ini pertanyaan pertama.

Kedua, juga perihal terkait TJSJL tanjung jawab sosial dan lingkungan, apakah juga apa disampaikan nanti kepada kami begitu, termasuk juga tentang penyerapan tenaga kerja, berapa persen pekerja, apakah pekerja yang terserap di lingkungan masyarakat sekitar dan domestik. Ini kan juga tentu pengaruh tentang transfer *knowledge* ya tanggung jawab tentang itu. Ini yang juga kadang-kadang tidak menjadi *concern* maupun di dalam implementasinya itu kadang-kadang juga jauh daripada apa yang direncanakan.

Tadi juga harapan kami terjadi suatu transfer *knowledge* kepada para pekerja kita, ini kan ada gap ya kita ini dalam sumber daya manusia. *Nah* ini juga harus dipersiapkan yang matang, supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan di jangka panjang *gitu*.

Yang terakhir, kami juga ingin di *update* kira-kira masalah-masalah apa sih yang sering Bapak temui dalam proses pembangunan dan pengelolaan kawasan industri. Apakah hambatannya termasuk juga ya dengan masyarakat begitu, dengan pemerintah ya mohon disampaikan juga realitas di lapangan, supaya kita di DPR juga mendengarkan masalah-masalah apa yang terjadi di lapangan dan menjadikan suatu rekomendasi, supaya itu tidak terjadi dan ada solusi.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi 1 menit, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

1 menit ya, *oke*.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Tapi memang kita, apalagi saya, kita berterima kasih 5 tahun terakhir Bapak Presiden Jokowi sudah sangat serius mencanangkan hilirisasi. Hilirisasi 5 tahun terakhir ini akan masuk saya lihat 10 tahun mendatang ke industrialisasi, itu memang harus kita dukung dan saya mengharapkan Bapak-bapak, apalagi Kementerian Perindustrian mendukung total proses hilirisasi yang sudah dijalankan oleh Bapak Presiden Jokowi agar bisa nanti ke proses



industrialisasi, sehingga *raw material* ini berhasil menjadi betul-betul *the final finish good* yang bisa langsung ke masyarakat.

Itu aja Pak Ketua, terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Luar biasa.

F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Nambahin sedikit Pimpinan, belum selesai tadi, tentang hilirisasi tadi sampai di mana sih Pak sebetulnya, apakah kita ramai di media saja atau artificial, atau retorika. Kita bicara hilirisasi tapi hilirisasi sampai di mana sih sebetulnya hilirisasi ini, begitu dan kita bicaranya kan luar biasa itu hilirisasi dan industri *manufacturing*, sampai di mana itu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jadi terima kasih Pak Sartono dan demikian juga Pak Ramson, kok baru saja keluar terus masuk dengan *statement* ini atau memang tidak ada apa-apa.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Baru saja saya diwawancarai TV tapi saya sampaikan yang itu kita sama-sama menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi, luar biasa 5 tahun terakhir ini. Luar biasa hilirisasi mengarah ke industrialisasi, Pak Ketua.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, luar biasa, ... (suara tidak jelas 02.13.40) ... juga itu mantap, ya itu tadi apa yang disampaikan.

Selanjutnya sudah apa ya PKS tidak ada, PAN juga tidak ada. Ooh iya Tuhanku PAN ada Pak Nasril.

Dipersilakan yang terhormat.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan, Anggota Komisi VII yang kami banggakan, kami hormati, Pak Dirjen dan para mitra.



Saya mulai dari dulu Pak Dirjen, Pak Dirjen ini kan Tupoksinya melakukan pengembangan kawasan, bener ya Pak? Oke. Tentunya 2020 kita melakukan perubahan, membuat Undang-Undang Cipta Kerja, pintu masuk para investor dan sangat luar biasa kalau satu sisi yang mengatakan dalam bentuk narasinya ya sangat liberal ya, yang satu sisi lain yang sangat *welcome*, jangankan karpet merah, karpet berlapis emas kita siapkan untuk para investor. Itu yang terbangun ya. *Nah* saya kembali kepada Anugerah Tambang Industri, lebih kurang dari 153 undang-undang dilebur menjadi satu undang-undang, sekat-sekat yang ada pada undang-undang teknis maupun undang-undang kebijakan dilebur menjadi undang-undang, namanya Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang 11 ya.

Artinya sangat luar biasa pemerintah melakukan perubahan undang-undang, demi apa? Demi masuknya para investor, demi pertumbuhan industri jangan kita masuk pada posisi negara de industrialisasi. *Nah* saya menyinggung kenapa? PT Anugerah tadi belum masuk pada tahap untuk mempresentasikan daripada kawasannya, begitu mudahnya dan begitu sangat luar biasa undang-undang yang mempermudah, kenapa yang mempermudah tersebut tidak dilalui aturan dan perundang-undangannya, terutama kepada PT Anugerah Tambang Industri. Jangan kita, ini kan Bapak ya, kita melihat pemegang saham di sini adalah 65% adalah Shandong Xinhai, Anugerah Mineral Sejahtera dari lokal, Bina Mitra Serasi lokal, artinya apa? Kalau saya melihat *feeling* apa strategi bisnis saya, melihat ini adalah Bapak menyediakan dan menyiapkan lahan sebagainya, betul ya Pak? Kalau begitu ya ini kan Bapak kan mengundang investor, mengundang *tenant* agar apa? Agar *tenant* masuk dalam masuk dalam posisi nyaman dan aman.

Di awal saja Bapak membuat tidak, tidak membuat kenyamanan, lahan tumpang tindih 4 perusahaan *loh*, Pak. *Nah* ini kan sesungguhnya aturan dan peraturan sudah dipermudah, kenapa ini tidak dilalui dengan baik? Kalau persoalan penyelesaian beberapa hal hak pemegang IUP yang lama, ya Bapak selesaikan dengan baik. Itu saya sarankan Pak, artinya apa? Jangan yang mudah Bapak persulit, jangan yang sudah regulasi yang nyaman Bapak buat tidak aman. Itu yang saya sikapi, *nah* karena luar biasa *loh* Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk berinvestasi, Pak. *Nah* ini kan Bapak kan seperti menyiapkan sebagai ibu rumah kos ya, bagaimana anak-anak kos bisa masuk ke dalam rumah kita, tentunya kan ruangnya diperbaiki, semuanya ini *oke lah* semua teknis diperbaiki tapi kan lokasinya dan lahan tersebut kan harus jelas, Pak.

Nah ini yang kita sarankan kepada Pak Dirjen ya harus diteliti Pak, jangan bermodalkan izin kawasan mereka sudah sangat leluasa, sangat leluasa mengundang *tenant*, menarik ya kadang-kadang ada yang sudah menarik DP dan sebagainya. Ini yang sesungguhnya hal-hal seperti ini perlu pengawasan daripada Pak Dirjen, karena Bapak hanya membangun tata kelola ya, itu yang kita harapkan dan selanjutnya saya pikir dari PT Anugerah Tambang ya Bapak persiapkan Pak dengan baik Pak, jangan Indonesia ini terkenal ya yang banyak tipu-tipunya katanya begitu, tidak Pak, undang-undang jelas dan sangat dipermudah untuk para investor. Jangan mentang-mentang ada sebuah kawasan dapat izin ya, izin dari Menko ya, izin kawasan.



DIRJEN KPAII KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (EKO S.A. CAHYANTO, S.H., LL.M.):

Izin, kalau perizinan semua ada di OSS Pak, di BKPM Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):

OSS ya, jangan mentang-mentang dapat mudah kita sebuah kawasan padahal bukan hak kita, Bapak sudah jual, Bapak sudah alokasikan ya semacam *picture* daripada proposal seakan-akan sudah *clear* dan nyaman, ini saya ingatkan. Jangan kita bermodalkan proposal dan bermodalkan izin saja Pak, tapi kepemilikan lahan jelas dan *clean and clear*, itu yang perlu kami ingatkan.

Selanjutnya, saya merujuk kepada ini Pak, kepada PT IMIP ya. Pak, kami minta data *lah* ya bahwa dari ya ini *kan* kapasitas produksi terpasang stainless steel ya Pak, sekitar setara dengan 413.000 ton nikel murni ya Pak di halaman ini, halaman berapa ini nggak ada halamannya. Ada *stainless steel sled*, *stainless steel hot rolled coil*, *stainless steel pickling line* dan juga *coral coil*, betul ya Pak dari paparan tadi.

Nah Kami ingin tahu tolong dijawab nanti ya, berapa peruntukan dalam negeri dan berapa peruntukan dalam luar negeri untuk ekspor Pak? Karena kami melihat ada di kawasan industri, inikan kebetulan yang nikel saja, ya. Pak Dirjen berapa kawasan industri yang berbahan nikel?

DIRJEN KPAII KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (EKO S.A. CAHYANTO, S.H., LL.M.):

Sampai saat ini dengan yang dalam proses pembangunan sekitar 12, Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):

Yang sudah *existing*?

DIRJEN KPAII KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (EKO S.A. CAHYANTO, S.H., LL.M.):

Yang sudah beroperasi 7, Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):

Dari 7 itu kita ingin tahu datanya, berapa sih kategori-kategori nikel tadi yang total produksinya yang di ekspor ya, berapa yang dipergunakan dalam negeri dan berapa juga jumlah apakah masih ada bahan bantu nikel yang kita impor.

DIRJEN KPAILI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (EKO S.A. CAHYANTO, S.H., LL.M.):

Kami akan cek dulu Pak ke masing-masing karena kami tidak tahu lengkap kapasitas *tenant* masing-masing.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):

Iya karena kan kita lihat industrialisasi hilirnya kan tidak *clear* nih Pak, tidak mengalir dan tidak pada masuk *finishing good*-nya, tidak sampai kepada, kita kan di *user* nih Pak, inikan kembali katakan ini *kan* afiliasi rata-rata yang industri di Morowali dan Konawe, maupun di Kendari, maupun yang di Halmahera ini kan semua ekspor ke China feronikelnya. Bahkan bahan *finishing good*-nya kan masuk lagi ke Indonesia, kita *kan* ingin *clear* juga, tidak mentah-mentah kita menerima sebuah *statement* yang disampaikan oleh Faisal Basri ya harga rata-rata bijih nikel kita 40 dolar ya. *Nah* setelah jadi feronikel kelipatannya apa 2 kali atau 3 kali, 4 kali balik sebagai *finishing good*-nya ini kan besar, Pak. Artinya kan kita kehilangan *value* di sini, kita ingin tahu berapa dari masing-masing tadi dari IMIP ya, termasuk dari IWIP juga kalau memang punya data Bapak karena Bapak sebagai pengelola kawasan pasti tahu data, berapa yang dipergunakan dalam negeri, maupun dilakukan ekspor terhadap feronikelnya ataupun yang sudah berbentuk setengah jadi tadi dalam bentuk sled maupun *hot rolled coil* tadi dan sebagainya, kami ingin tahu, nanti tolong dijawab.

Kenapa ya Pak, sampai hari ini ya, sampai hari ini dari dari pasar stainless steel maupun *finishing good*-nya yang ada di pasaran bebas, kenapa lebih mahal produksi dalam negeri dibanding kita yang impor dari luar. Padahal *raw*-nya dari kita semua, padahal kita juga melakukan pembebasan *tax allowance*, *tax holiday*, kenapa tidak ada minat hilirisasi nikel di apa dalam bentuk, apakah perabotan rumah tangga dan sebagainya, apakah dapur, peralatan dapur dan sebagainya.

Tadi sampaikan kepada Pak Ketua tadi, sendok, saya yakin saya itu sendok itu lebih mahal sendok China, *eh* lebih mahal sendok yang disampaikan di sini daripada China punya yang sampai ke Indonesia. Taruhan jari saya berani Pak dipotong, saya kemarin beli sendok itu 1 lusin Rp11.000,- Pak, kalau peniti nanti saya tugaskan Pak Lili aja, tahun berapa Pak Lili bisa produksi peniti yak arena dari almarhum nenek saya, neneknya lagi, neneknya lagi, neneknya lagi dan neneknya lagi sampai hari ini emak saya dan istri saya beli peniti impor, bisakah Pak Lili berpikir untuk itu. Saya pikir bisa Pak, melaksanakan nggak tahu lah, Pak.

Nah saya kembali lagi, saya ingin tahu perbandingannya dan selanjutnya saya ingin tahu ya terhadap ini IMIP maupun IWIP ya. Kalau IMIP smelternya ada ya Pak, smelter nikel.

DIR. OPERASIONAL PT IMIP:

Kita *nggak* ada, kita kawasan industri.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):

Grupnya ada, afiliasi grup kita ada pemilik smelter?

DIR. OPERASIONAL PT IMIP:

Ada Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):

Ada. Tapi bisakah saya bertanya sesuatu tentang itu, paham *nggak* kira-kira Pak. Tadi Pak Weda Bay, tadi dia bicara tentang harga 40 tadi OR tadi ya Pak dibeli ya, Pak. Bapak tahu *kan* di kawasan Bapak itu penampung OR-nya *kan* ada beberapa smelter betul ya, Pak? Penampung OR dari beberapa smelter di kawasan Bapak banyak *kan*, yang membeli OR itu smelter yang ada di kawasan Bapak, itu *kan* rata-rata membeli dari penambang-penambang yang ada di sekitar kawasan. *Nah* kami beberapa kali di sini mungkin dalam 2 bulan ini, asyik menerima keluhan-kesah daripada penambang-penambang yang ada di apakah Morowali, apakah di Sultra, keluhannya apa? Penambang itu *nggak* bahagia kenapa, sih? Hanya mendapat upah gali saja. Bahkan juga penambang-penambang yang mereka sampaikan di sini keluhan-kesah mereka itu ya banyak juga pengusaha-pengusaha tambang itu yang rugi melulu, padahal ICI-nya *kan* tetap, ICI-nya *kan* *growth*-nya bisa naik ya, turunnya juga *nggak* drastic *nggak* banyak, apa sih penyebabnya, Pak?

Minggu yang lalu kita undang surveyor sini, *nah* ternyata surveyor juga bermasalah dan grup-grup Bapak di sana itu ketika membeli OR, ketika membeli OR dengan harga CIF betul ya Pak, IMIP ya Pak, rata-rata kita tidak FOB ya, Pak.

DIR. OPERASIONAL PT IMIP:

Tadi pagi saya tanya bagian pembelian dia bilang FOB semua, Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):

FOB?

DIR. OPERASIONAL PT IMIP:

Iya, makanya saya melihat kemarin ada RDP itu yang dipertanyakan. Jadi saya tanya kita ini FOB apa CNF, dijawab ke saya di bagian pembelian FOB, Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):

Nah saya dari beberapa kawasan ini yang *clear* ini IMIP ini, IMIP ini *clear* ya, sebuah kawasan industri yang taat aturan dan ya saya bukan menguji ya Pak. Kalau IWIP bagaimana Pak, itu FOB atau CIF, Pak.

DIRUT PT IWIP:

Jadi nanti kita tanyakan ke masing-masing *tenant* kami, tetapi kalau kita monitor harusnya sesuai aturan, apakah itu ABM-nya, apakah itu kondisi transaksinya begitu Pak, nanti kita detailnya akan monitor lagi Pak, karena ya kalau *nggak* sesuai aturan *nggak* boleh Pak, harus mengikuti aturan yang ada.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):

Iya aturan yang ada kan mengharuskan wajib dengan FOB kan gitu berdasarkan Surat Edaran Menteri ESDM, tetapi rata-rata yang penjual harus pakai katanya CIF dan surveyor bermain dengan bentuk kartelisasinya, surveyor. Akhirnya penambang tersebut jangankan untung, buntung semua. *Nah* ini yang kami ingin tahu, apakah pemilik kawasan yang sesungguhnya memiliki afiliasi kepada smelter, saya pikir ya taat aturan *lah*. Kita ini mendukung sebuah kawasan, sebuah smelter, sebuah industri yang taat aturan dan peraturan, itu saja dan kita dukung itu, sepenuhnya kita dukung 1000% ya.

Itu pendapat kami Pimpinan dan terakhir tentunya kepada Pak Dirjen, tolong pilih-pilih ya jangan smelter melulu tapi ya undang investor yang mau berinvestasi terhadap hilirisasi industri kita, industrinya. Jadi kalau *tenant-tenant*, mereka inikan penyedia *tenant* ini, *nah* undang mereka ke sana itu berikan fasilitas ya terhadap jika mereka mau membuat *downstream*-nya dengan kebutuhan nasional kita, apa yang dibutuhkan secara nasional itu harus didorong.

Itu Pimpinan, respon kami terima kasih.

KETUA RAPAT:

Luar biasa Pak Nasril.

Intinya bahwa investasi itu memang penting sampai Omnibus law itu adalah merangkum sekian peraturan yang intinya adalah mempermudah investasi, karena dengan investasi maka ada men-*generate* ekonomi kita. Ingat pertumbuhan sangat ditopang oleh investasi, ekspor dan konsumsi, *nah* kita sisi yang itu yang kita terus galakkan, sehingga tadi dikemukakan tetapi ya tidak harus yang berkualitas katakanlah demikian, tadi investasi sudah kalau dalam kawasan industri ini yang khususnya menyangkut kawasan industri menyangkut sumber daya alam nikel ini, jangan lagi-jangan lagi yang hanya sebatas apa industri yang bahan baru, jadi industrinya.

Ini sudah mulai *nggak* fokus ini memang, karena, bukan, ini Ayu Nadya ini sudah wa-wa terus, istri saya maksudnya, jadi itu saya kira cukup ya, cukup ya dan ini dan bagini kita semua serius, ini forum betul-betul forum dalam rangka menjalankan tugas kenegaraan kita, tugas konstitusional masing-masing kita. Maka atas seizin anggota yang terhormat kita mintakan jawaban tertulis saja ya dan ini karena sudah 2 jam lebih, karena persis kita mulai dari pukul 14.00 kurang 10 menit, sekarang sudah pukul 16 lewat 20 menit bahkan.

Jadi tolong jawaban tertulis nanti maka marilah kita cermati apa yang menjadi kesimpulan rapat kita hari ini.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Draft kesimpulan dapat Rapat Dengar Pendapat atau RDP dan Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dan Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dengan menghadirkan Direktur Utama PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Dirut PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Dirut PT Anugerah Tambang Industri (ATI) dan Dirut PT Ration Bangka Abadi (RBA) Kawasan Industri Sadai, Selasa 20 Juni 2023.

1. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen ILMATE dan Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian untuk dapat memastikan nilai penerimaan negara, baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak dari pengelolaan dan tenant serta kawasan industri.

Loh kok berhenti nih apa maksudnya, medesak **...(suara tidak jelas 02.34.19)...** dapat memastikan, betul? Memastikan nilai penerimaan negara pajak, naik atau turun gitu maksudnya, memastikan naik atau memastikan atau apa, maksudnya.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Mungkin maksudnya berapa kali nilainya.

KETUA RAPAT:

Memastikan, setiap kawasan industri sesuai misalnya dengan aturan yang ada, kalau itu kan kalimat tidak bermakna itu.

Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen ILMATE dan seterusnya untuk dapat penerimaan nilai penerimaan negara, baik pajak maupun penerimaan bukan pajak dari pengelolaan dan *tenant* setiap kawasan industri.

F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Pimpinan, maksudnya tujuan kita rapat ini kan bagaimana kita ingin memastikan ILMATE dan KPAII ini dapat apa Namanya.

KETUA RAPAT:

Menggali, meningkatkan.

F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Iya, tumbuhnya industri, bukan persoalan. Jadi bukan itu tujuan utama kita masalah penerimaan negara ini *oke*, maksud saya tapi tujuannya kita

bagaimana sih kesiapan transformasi ekonomi kita ya kan dari komoditas kepada pengolahan tersebut.

KETUA RAPAT:

Oke, Komisi VII dan seterusnya untuk memastikan terjadinya transformasi, begitu.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Itu yang kedua kayaknya, industrialisasi saya lihat itu yang kedua dibuat.

KETUA RAPAT:

Oh ya udah ada.

F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Oh sudah ada yang kedua.

KETUA RAPAT:

Drop aja? Iyalah nanti kita bikin baru kalau menyangkut tentang pajak dan ini apa meningkat atau sesuai aturan atau apa kan harus ada begitu.

Jadi Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Perindustrian untuk melakukan industrialisasi di setiap kawasan industri dengan mendorong pemanfaatan produk turunan nikel, berupa stainless steel dan produk turunannya untuk dapat dimanfaatkan oleh industri di dalam negeri.

F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Saya kira bukan persoalan nikel saja tapi produk komoditas secara umum kan.

KETUA RAPAT:

Apakah ini kita batasi yang kita hadir di sini.

F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

... (suara tidak jelas 02.36.39) ... aja Pak Ketua, kita batasi aja.

KETUA RAPAT:

Yang hadir di sini saja, nikel ini Pak Bambang begitu, nanti di sesi lain yang menyangkut komoditas lain. Saya kira nanti akan masuk juga timah pasti, saya tahu yang anda maksud ya, ada urusan timah dengan Pak Bambang, *nggak*, oh timah juga, oh berarti tidak hanya nikel. Ini kok Bambang kok Mas Bambang agak ragu-ragu kenapa? Ya sudah ditambahi produk turunannya

nanti, nikel dan produk, bukan kita kan kita bicara nikel dan komoditas lain gitu ya.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua, sebenarnya bukan hanya dapat dimanfaatkan oleh industri dalam negeri karena industri kita belum bisa masuk ke final produknya itu, itu yang harus diciptakan oleh Kementerian Perindustrian supaya kondusif tumbuh industri yang memproses itu.

KETUA RAPAT:

Kita mendorong kan gitu, Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen ILMATE dan Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian untuk melakukan industrialisasi di setiap kawasan industri dengan mendorong pemanfaatan produk turunan nikel dan komoditas lain, yang berupa stainless steel dan timah berupa ingot dan komoditas lain saja ditambah.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Disebut, berarti industri yang ada padahal memerlukan pembangunan industri untuk mengolah itu lagi, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Betul sekali.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Iya, cuman bahasanya bagaimana TA itu tolong dibuat.

DIRJEN KPAII KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (EKO S.A. CAHYANTO, S.H., LL.M.):

Mohon izin masukan, yang kami fokuskan saat ini adalah mengisi pohon-pohon industri yang masih kosong Pak, dalam turunan. Jadi yang dimaksud hilirisasi adalah mengisi pohon-pohon industri yang masih kosong Pak, dari yang hulunya begitu. Jadi kalau, mohon izin, mungkin untuk mendorong timbulnya industri-industri baru untuk mengisi pohon industri dalam rangka.

KETUA RAPAT:

Mendesak untuk menciptakan ekosistem begitu, kok ekosistem terlalu jauh.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Punya industri-industri yang mengolah finalnya gitu, bagaimana bahasanya Pak Dirjen coba.

DIRJEN KPAII KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (EKO S.A. CAHYANTO, S.H., LL.M.):

Namanya industri turunannya Pak, industri turunannya. Jadi yang dimaksud dengan industri turunannya adalah tercipta ada industri baru dengan KBLI baru Pak, sehingga menciptakan produk baru dalam bentuk HS baru begitu.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Misalnya Pak Ketua interupsi, soal baterai bagaimana supaya baterai itu industri menghasilkan baterai itu tumbuh ada begitu, ini kan belum ada, iya belum ada. Jadi itu yang harus diupayakan oleh negara Kementerian Perindustrian tentu kerjasama dengan DPR RI. Jadi bukan industri yang sudah ada, industri yang sudah ada belum bisa mengolahnya itu, jadi harus tumbuh bersamaan gitu.

DIRUT PT RBA:

Izin Pimpinan, mungkin kalimat pasnya nikel dan turunannya, serta timah dan turunannya begitu. Mungkin kami tambahkan Pimpinan, untuk timah itu ada 14 mineral turunannya, Pimpinan, iya.

DIRJEN KPAII KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (EKO S.A. CAHYANTO, S.H., LL.M.):

Usul mengubah Pak Pimpinan, Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen ILMATE dan Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian untuk melakukan industrialisasi di setiap kawasan industri dengan menumbuhkan industri turunan produk nikel dan timah, serta turunannya ini. Untuk menumbuhkan industri turunan produk nikel dan timah. Itu dapat dimanfaatkan tidak perlu Pak, jadi sampai di timah saja, itu memang harus ditumbuhkan.

Demikian.

KETUA RAPAT:

Sesimple itu, akhirnya definisi pemerintah juga yang.

Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen ILMATE dan Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian RI untuk melakukan industrialisasi di setiap kawasan industri dengan menumbuhkan industri turunan produk nikel dan timah.

Begitu cukup, cukup Pak Adian?

(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

Ya udahlah Kita kalau diskusi terus, istri saya udah berapa kali WA belum saya jawab.

2. Komisi VII DPR RI mendesak dan seterusnya untuk membuat perencanaan pengembangan kawasan industri terintegrasi.

Oke, setuju ya normatif sih ini, sebenarnya ini terserap di atas juga tapi *nggak* apa-apa.

(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

3. Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen dan seterusnya, Kementerian Perindustrian agar mengusulkan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan perbaikan regulasi fiskal mengenai pengenaan atau terkait pengenaan PPN 11% pada produk pengolahan setengah jadi.

F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Sebetulnya bukan perbaikan, peninjauan, iya meninjau regulasi.

KETUA RAPAT:

Kalau gitu, Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Perindustrian untuk mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan peninjauan regulasi yang dapat menumbuhkan, mungkin ya.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Untuk yang di poin 2 saya dengar dari tadi ini, poin 3. Itu kan tidak hanya untuk regulasi fiskal terkait PPN pengenaan PPN 11%, tapi sebenarnya kan ada *item-item budget* yang lain. Jadi kebijakan fiskal apa namanya secara ya holistik dan komprehensif kira-kira gitu loh, jadi ini baru salah satunya. Bisa saja juga kan feed in tarif yang lain Pak Ketua, ya jadi membantu juga, betul Pak Ketua, iya itu salah satu contohnya.

Jadi mungkin bisa ditambahkan kalimat peninjauan regulasi fiskal, regulasi fiskal secara komprehensif dan holistic, terutama terkait penggunaan PPN 11% pada produk pengolahan setengah jadi, seperti stainless steel, ingot agar industri pengolahan lanjutan lebih kompetitif.

KETUA RAPAT:

Ini sebetulnya kesimpulan ini bagus sekali karena spesifik ya dengan ada sebuah payung atau credo bahwa regulasi fiskal secara komprehensif dan holistic, terutama terkait dengan pengenaan PPN 11%.

Memang ini Bapak-Ibu seklaian, sangat-sangat dikeluhkan bagi industri dalam negeri yang mau memakai itu produk turunan dari nikel, harus dipajaki 11%. Sementara tadi sebagaimana disampaikan kalau ekspor malah tidak dikenakan 11% *kan nggak* adil ini, kan jadi *competitiveness* barang dalam negeri jadi setidaknya lebih mahal 11% begitu Pak.

F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Betul, jadi *reasoning*-nya Pimpinan bahwa PPN ini jangan dikenakan di tengah tapi di akhir produk akhir, di ujung. Jadi PPN itu jangan dikenakan kepada industri, tetapi kepada konsumen akhir seperti itu.

KETUA RAPAT:

Oke, itu nanti kesimpulan yang lain di tempat lain Pak Bambang, saya kira. Saya kira ini sepakat ya, ini diketok ya?

(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

4. Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen ILMATE agar mengembangkan kawasan industri, tidak hanya memfasilitasi *tenant* bermodal besar tetapi juga kepada pelaku IKM dan UMKM, karena IKM itu singkatan dari industri kecil menengah, kalau itu kan usaha dalam rangka industri turunan dan rantai pasok dari komoditas unggulan di kawasan tersebut, ya unggulan kawasan boleh lah.

Setuju ya, ini saya kira ini bentuk *afirmatif action* bagi kita semuanya.

(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):

Pimpinan, sebelum masuk poin 5, saya ingin menambahkan terhadap perilaku pemilik proposal yang mengajukan sebuah kawasan yang sesungguhnya tidak taat pada regulasi. Artinya tumpang tindih lahan ya tetapi mereka sudah dikeluarkan oleh OSS mereka dan mereka berdiri di atas lahan siapa.

KETUA RAPAT:

Iya nanti Kementerian Perindustrian agar cermat.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):

Saya pikir *full*-nya, Komisi VII DPR RI mendesak kepada pemerintah tentunya di dalam mengeluarkan izin kawasan industri, dalam mengeluarkan izin kawasan industri benar-benar bersih dari setiap persengketaan lahan, lahan kawasan sesuai dengan aturan-aturan.

KETUA RAPAT:

Iya ini istilahnya *clear and clean*.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):

Clear and clean. Iya itu bahasanya.

KETUA RAPAT:

Saya kira meskipun normatif tapi penekanan yang menurut hemat kita memang perlu, betul setuju?

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua, interupsi.

Itu jangan mendesak pemerintah, ditunjuk saja yang hadir rapat sekarang, kalau pemerintah *kan* ya langsung disebut *dong* dirjen.

DIRUT PT RBA:

Izin Pimpinan, untuk terkait tumpang tindih lahan itu ada 3 instansi terlibat yang diberikan diberikan kepada kita, satu BPN, yang kedua OSS. Jadi hanya sifatnya Kementerian Perindustrian setahu saya itu hanya berupa izin prinsip, Pak. Jadi nanti Pertek-nya, itu Pertek teknisnya diterbitkan oleh BPN, jadi itu yang membuat itu bersengketa atau tidak itu Pertek dari BPN, nanti masuk OSS, kalau di OSS terima Pertek-nya *clear*, izin dari Kementerian Perindustrian terbit, begitu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Siapa yang mengeluarkan izin untuk kawasan industri?

DIRUT PT RBA:

OSS-nya, system OSS-nya tapi.

KETUA RAPAT:

Ditjen KPAII?

DIRUT PT RBA:

Bukan, bukan, tapi berdasarkan Pertek BPN, jadi ada pertimbangan teknis dari BPN menyatakan bahwa hanya akan diajukan kawasan industri itu tumpang tindih atau tidak.

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Pimpinan izin, jangan per kasus, kesimpulan ini tidak untuk menjawab kasus dia, tapi juga kasus Dirut Anugerah Tambang Industri yang kasusnya tidak sama. Tapi kan prinsipnya begini, kenapa terjadi tumpang tindih? Karena negara mengeluarkan 2 aturan yang juga tumpang tindih, *nah* tapi jangan kita bahas kasus per kasus nanti panjang sekali kesimpulan kita Pimpinan, ini sudah tepat ini.

Terima kasih.

F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua, jadi mendesak Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian RI untuk berkoordinasi dengan institusi pemerintah terkait, jadi jangan mendesak pemerintah di situ. Jadi yang kita minta ke yang kita rapat sekarang, kalau pemerintah secara umum ya ikut presiden, apa kita desak, padahal kita *nggak* rapat dengan Bapak Presiden, kita rapat dengan dirjen begitu. Kita kan harus jaga *dong*, kan marahnya Pak Presiden, jadi untuk berkoordinasi dengan instansi terkait di pemerintah bisa, institusi terkait lah, institusi terkait.

KETUA RAPAT:

Jadi kok saya melihat ini kok semacam apa yang sering terjadi di baliho-baliho itu, menang bersama presiden. Inilah kita Komisi VII kan gitu, gitu loh.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, SE):

Iya Pimpinan, saya pikir *nggak* ada masalah yang penting tujuannya kepada pemerintah kan gitu karena sering sekali kita lihat di lapangan ini para membuka kawasan industrinya menjual proposal, lahan entah siapa punya, *nggak* tahu kita, itu dia.

F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Izin pimpinan, perbaikan kata-kata pada poin 4 itu, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

4 atau 5?

F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Sorry 4, point 4, sebenarnya begini. Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen ILMATE dan Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian agar pengembang, mendorongnya kenapa *kan* pengembang berbeda lagi, mendorong mengawasi agar pengembang tidak hanya memfasilitasi. Ini harus ada kata kerjanya, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya, ya betul. Maksudnya dirjen ini ngapain terhadap pengembang *gitu loh*, agar memastikan, betul. Agar memastikan pengembang kawasan industri tidak hanya, nah, *oke* ya.

DIRJEN KPAII KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (EKO S.A. CAHYANTO, S.H., LL.M.):

Mohon izin Pimpinan, untuk mengganti kata pengembangan dengan pengelola, Pak.

KETUA RAPAT:

Pengelola, supaya tidak berbeda dengan *real estate* gitu ya, ya kita tadi udah, ini kita ketok ulang.

(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

5. Komisi VII DPR RI mendesak dan seterusnya untuk berkoordinasi dengan institusi terkait agar dalam mengeluarkan izin kawasan industri benar-benar bersih, kalimat benar-benar bersih dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin, bukan begitu ya. Apa coba kalimatnya, *clear and clean* ya, ya sudah ya begitu ya karena ini maknanya sudah kita pahami *kok*.

(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

6. Komisi VII DPR RI Kementerian Perindustrian, *kok* banyak sekali kesimpulan hari ini, oh jawaban tertulis saya kira.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak Ketua, izin Pak Ketua, mungkin sebelum pindah ke poin 6 Pak Ketua. Itu di poin 5 masih Dirjen K apa tadi tuh, mungkin di 6 baru ya, sebelum pindah di Dirjen ILMATE atau apa, atau yang dirjen-dirjen punya Dirjen ILMATE semuanya dibikin jadi satu kluster, kemudian yang Dirjen KPAII dibikin juga jadi satu kluster jadi *nggak* bingung *gitu loh*.

Jadi Komisi VII DPR RI mendesak satu, yang bagian kedua, tadi kita sempat mempercakapkan dari mulai masih dari sesi informal sampai masuk di ruangan tentang pengembangan kawasan strategis industri, yang kesannya masih bertumpu di kawasan Jawa bagian barat dan tengah, hampir di bagian timur Indonesia hanya tergantung dari kalau ada korporat yang masuk tapi bukan karena *by roadmap, by design* negara.

Jadi saya ingin tambahkan karena ini berkaitan dengan KPAIL ini amat sangat penting Pak Ketua, jadi Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen KPAIL Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk mengembangkan *road map* pengembangan kawasan industri, baik yang pengembangan kawasan industri strategis yang berbasis sumber daya atau yang berbasis karakteristik unggulan lokal, yang berbasis karakteristik unggulan local, dan tadi itu apa yang internasionalnya itu tadi, yang memiliki potensi, yang memiliki potensi dan daya saing internasional. Oke, memiliki potensi dan daya saing internasional, ya itu dari kami Pak Ketua, dari tadi saya sudah bicara karena semuanya di Jawa atau di daerah-daerah yang hanya penghasil.

KETUA RAPAT:

Secara prinsip setuju, ini memang perlu adanya afirmatif *policy* kebijakan yang memihak, bukan hanya sekedar *business as usual*, tapi memang kadang-kadang kalau dalam itu pasti akan timpang disparitas, perlu ya kehadiran negara. Apalagi nanti misalnya dipelopori misalnya BUMN-BUMN industri kan begitu misalnya.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Yang kedua Pak Ketua, ini belum selesai koma, yang kedua jadi *road map* yang pertama, ini berkaitan dengan pengembangan kawasan industri strategis yang sifatnya, apa namanya bisa dapat digambarkan dari barat sampai ke timur.

Yang kedua, mengembangkan *roadmap* hilirisasi, jadi bolehlah program-program yang industri beratnya di mana-mana, yang penghasil itu ya, tetapi industri-industri turunan yang kalau bisa digandengkan dengan komoditi unggulan lokal itu juga bisa memberikan dampak *multiplier effect* ke daerah-daerah yang nonpenghasil. Saya *nggak* tahu bagaimana membahaskan ini dari tadi, tapi dari tadi ini kegelisahan saya jadi saya hanya mendengar dan menyerap, tetapi mungkin ada *roadmap* hilirisasi yang memberikan dampak *multiplier effect* kepada daerah-daerah nonpenghasil, sehingga ada ketergantungan ekonomi Pak, kalau komponen-komponen tertentu hilirisasinya ada di kawasan-kawasan tertentu. Kalau ada ketergantungan ekonomi antar kawasan dinamika ekonominya pasti jalan Pak dan sudah pasti seluruh gugus-gugus wilayah ke-Indonesiaan kita ini akan bertumbuh dengan sangat sehat.

Itu catatan dan *insight* dari saya aja Pak Ketua, terima kasih.



F-P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua, kayaknya Dirjen KPAll ini harus kerjasama dengan Bappenas gitu, jadi berkoordinasi dengan Bappenas.

KETUA RAPAT:

Begitu berbasis sumber daya alam ya, satu aja dulu ya, ya kayaknya sudah ini *kok*, *roadmap* itu, setuju Bapak-Ibu sekalian ya?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

7. Komisi VII DPR RI meminta untuk ditulis secara tertulis dan selanjutnya diserahkan pada tanggal 27 Juni.

Sanggup Bapak-Ibu seklaian ya, setelah ini Bapak-Ibu sekalian silahkan nanti apa yang menjadi pertanyaan tadi secara tertulis dijawab secara tertulis, tidak untuk apa-apa, secara bersama-sama ingat, Komisi VII itu tidak sekedar menjalankan tugas normatif ke tiga tadi, yakni legislasi, *budgeting* dan tetapi juga akan menjadi *problem solving*.

Bapak-Ibu nanti bisa melapor apa hambatannya, kami yang akan ikut memecahkan masalah tetapi ingat bukan berarti kami *cawe-cawe*, tidak. Hari ini saya bahagia betul Pak Ramson selalu mengutip bahasa presiden, *gitu*, betul.

Saya kira begitu Bapak-Ibu sekalian, kita setuju semuanya yang kita simpulkan tadi.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baiklah, sebelum kita tutup kita bersyukur bahwa rapat ini luar biasa, 3 jam persis tapi ya inilah kami-kami, jadi Bapak-bapak, Ibu sekalian kalau dipanggil jangan takut. Kami memang orang-orang detail Pak, mohon maaf. Kita semuanya memang wajib detail dari aspek *finance*, dari aspek apapun. Yang menjadi catatan kami adalah Bapak-Ibu sekalian bahwa segala sesuatu industri tadi juga akan terkait dengan tema besar, yakni *energy transition*, ada juga *climate change* dan sebagainya. Sehingga sebagaimana PLTU-PLTU itu tadi pasti cepat atau lambat akan juga dievaluasi karena itu juga yang memberi. Meskipun kita juga dengan secara gegabah lantas semua akan *face out face off*, tidak, kenapa? Nanti akan ada namanya RA *hundreds certificate renewable energy certificate*. Barang-barang yang diproduksi tidak akan laku di pasar Eropa di tahun 2027 kalau tidak diproduksi secara proporsional menggunakan energi baru terbarukan, sekali lagi secara proporsional, bukan berarti.

Nah inilah yang juga harus diantisipasi, harus dimitigasi sejak dini. Saya kira itu, sekali lagi terima kasih dari kementerian dan juga dari Bapak-Ibu selaku pelaku kawasan industri, pengelola kawasan industri.

Saya sampaikan terima kasih, *nah* sebelum saya akhiri dipersilahkan Pak Dirjen KPAI mungkin mewakili untuk ada semacam *closing statement*.

Dipersilakan yang terhormat.

DIRJEN KPAI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (EKO S.A. CAHYANTO, S.H., LL.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI,
Para Anggota Komisi VII DPR RI.

Kami mewakili Kementerian Perindustrian dan 4 pengelola kawasan industri yang hadir pada rapat dengar pendapat hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian, masukan juga arahan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat, sehingga rapat dengar pendapat hari ini sudah menyampaikan kesimpulan yang akan kami tindaklanjuti.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah *Subhanaalahu Wa Ta'ala*, syukur *alhamdulillah* maka rapat ini saya nyatakan ditutup.

Billahittaufig wal hidayah,
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.50 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

Jakarta, 20 Juni 2023
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Dwiyanti, S.Sos.
NIP. 196903131990032002

